

RENCANA STRATEGIS



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2016 - 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara No. 2 KAJEN - Telp. (0285) 381928 - Fax. (0285) 381929
Email : dprdpekalongankab@ymail.com

Kode Pos 51161 - KAJEN

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 050/467.4/IV/2017

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021.

Kajen, 12 April 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN



MOKHAMAD ZAKI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19580511 198003 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dewasa ini adalah isu pemerintahan yang baik (good governance), antara lain ditandai dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan. Good governance merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam konteks good governance tersebut.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dewasa ini, karena perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis disusun sebagai guidance for future dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistimatis dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja.

Sebagai landasan utama untuk melakukan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat(7) menyebutkan bahwa “ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan

Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif “, serta pada pasal 7 ayat (2) disebutkan “ Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pasal 272 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan perlu menyusun rencana strategis untuk mengelola perubahan lingkungan strategis secara efektif dan proaktif sehingga pelaksanaan tugas benar-benar dapat terlaksana secara efisien, efektif dan terpadu, guna menghasilkan rencana pembangunan yang profesional dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun periode Renstra secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan menurut pembentukannya, yaitu Peraturan

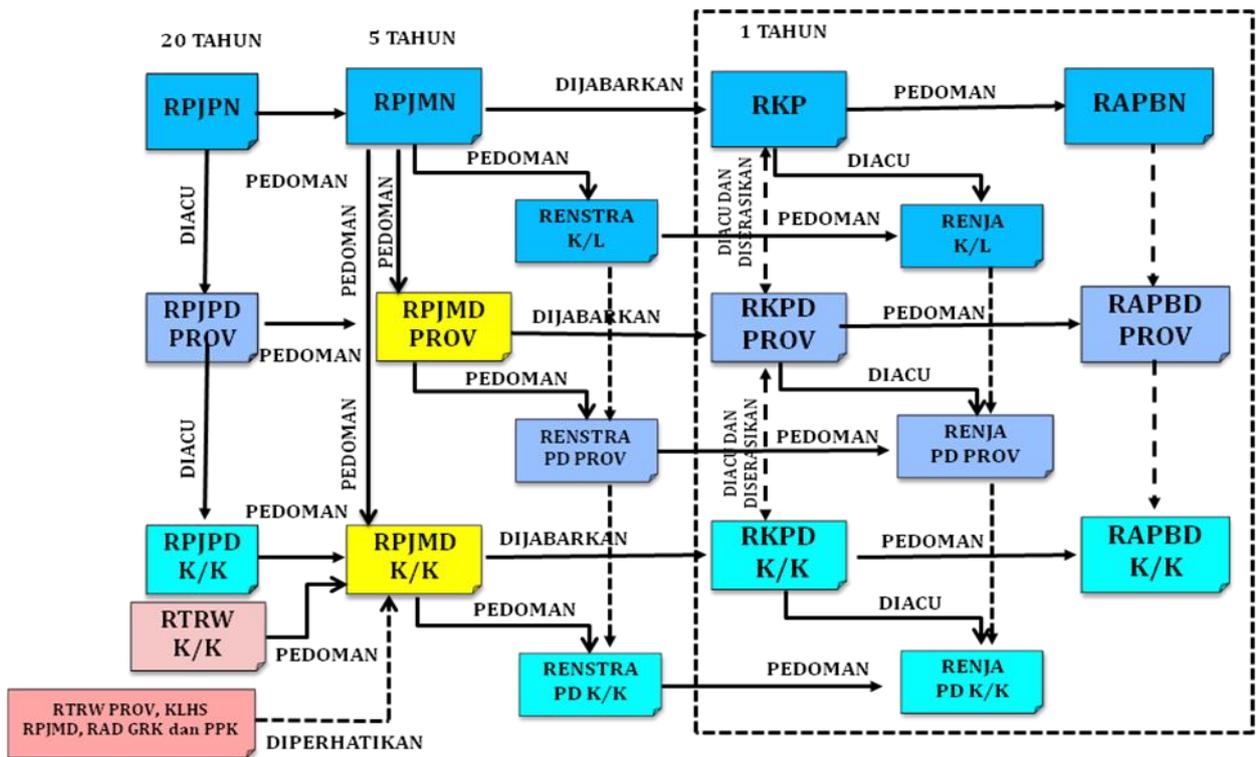
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan antara kedua dokumen perencanaan ini saling terkait dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan, strategi dan Program Kegiatan. Sedangkan dalam skala organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana strategis merupakan acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Renstra PD ini berfungsi sebagai pedoman/acuan setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik atau dalam pelaksanaan kerja masing-masing Perangkat Daerah sehingga kinerja aparatur dapat terukur dan berjalan sesuai visi-misi yang sudah ditetapkan.

Proses penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2016 – 2021 berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan:

- (1) Persiapan penyusunan Rencana strategis Sekretariat DPRD,
- (2) Penyusunan rancangan Rencana strategis Sekretariat DPRD,
- (3) Penyusunan rancangan akhir Rencana strategis Sekretariat DPRD,
- (4) Penetapan Rencana strategis Sekretariat DPRD.

Keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1
 Hubungan Renstra Sekretariat DPRD dengan
 Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Dari gambar alur proses penyusunan Renstra diatas menunjukkan bahwa rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan disusun dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan Rencana Strategis Sekretariat DPRD dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021. Dengan tersusunnya Rencana strategis Sekretariat DPRD diharapkan dapat menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD setiap 1 (satu) tahun dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Rencana kerja tersebut menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD (RKA Sekretariat DPRD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan

Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 pada dasarnya dimaksudkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 dapat tercapai.
2. Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 bertujuan :

1. Menjabarkan dan menyusun acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja opsional serta kegiatan indikatif OPD;

2. Untuk cara kerja satuan kerja organisasi perangkat daerah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif;
3. Sebagai informasi kepada seluruh jajaran staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang mengacu pada RPJMD.
4. Menetapkan strategi pembangunan, kebijakan umum, program pembangunan OPD selama lima tahun.
5. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra SKPD meliputi 6 (enam) BAB dan secara singkat disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat hal-hal yang fundamental dalam penyusunan rencana strategis meliputi latar belakang, kedudukan dan peranan Renstra Sekretariat DPRD dalam perencanaan daerah, landasan hukum ,maksud dan tujuan dan sistematika

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

Pada bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan , sumber daya Sekretariat DPRD, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan isu-isu strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bab ini mencakup Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PELAKSANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini menguraikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang diukur secara spesifik baik kuantitatif dan/atau kualitatif

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

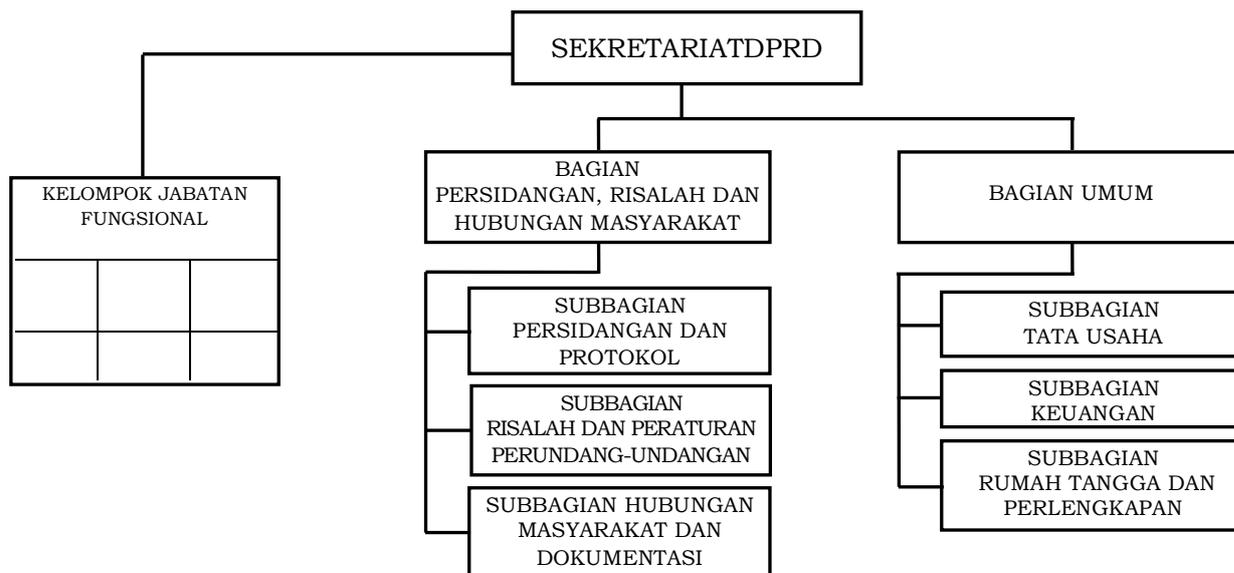
Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab III bagian kesatu pasal 40 disebutkan bahwa:

- a. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- b. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewanyang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Persidangan, Risalah Dan Humas, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Persidangan Dan Protokol;
 - b. Sub Bagian Risalah Dan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Sub Bagian Humas Dan Dokumentasi
3. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dan Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk itu struktur organisasi yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan Sekretaris Dewanyang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja lima tahunan dan tahunan Sekretariat DPRD dengan mempelajari aturan, meneliti dan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis supaya tugas dilaksanakan sesuai ketentuan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas Sekretariat DPRD dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang tugasnya dengan unit kerja terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program;
- f. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD dengan memberikan motivasi dan koordinasi untuk kelancaran dan tertib administrasi;
- g. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD dengan memberikan motivasi dan koordinasi untuk kelancaran dan tertib administrasi keuangan;
- h. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD dengan koordinasi agar pelaksanaan rapat berjalan lancar;
- i. Menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dengan koordinasi untuk membantu pelaksanaan tugas DPRD;

- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang tugasnya dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan Penilaian Prestasi kerja kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sehubungan dengan bidang tugas pekerjaan.

2) Bagian Persidangan, Risalah Dan Humas

Bagian Persidangan, Risalah Dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

Kepala Bagian Persidangan, Risalah Dan Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan persidangan dan kegiatan protokoler sidang DPRD, penyusunan risalah dan peraturan perundang-undangan serta pelaksana kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi sidang/rapat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, bagian persidangan, risalah dan Humas mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan, pemantauan sidang/rapat dan kegiatan protokoler sidang/rapat DPRD;
- b. Pelaksanaan penyusunan risalah hasil sidang/rapat dan kegiatan DPRD serta penyusunan materi rancangan peraturan perundang-undangan produk DPRD;
- c. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi hasil sidang/rapat DPRD.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Persidangan, Risalah Dan Humas mempunyai uraian tugas sebagaiberikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bagian Persidangan, Risalah Dan Humas dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis Bagian Persidangan, Risalah Dan Humasdengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bagian Persidangan, Risalah Dan Humassupaya tugas dilaksanakan sesuai ketentuan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan Bagian Persidangan, Risalah Dan Humasuntuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan Bagian Persidangan, Risalah Dan Humasdengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan sidang/rapat DPRD melalui koordinasi dengan instansi terkait dan Badan Musyawarah untuk menentukan waktu penyelenggaraan sidang/rapat DPRD;
- h. Mengoordinasikan pemantauan sidang/rapat DPRD denganmeneliti daftar hadir dan melaporkan pada pimpinan rapat untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan sidang/rapat DPRD;
- i. Mengoordinasikan kegiatan protokoler sidang/rapat DPRD dengan monitoring dan evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan sidang/rapat DPRD;
- j. Melaksanakan penyusunan risalah hasil sidang/rapat dan kegiatan DPRD melalui koordinasi dan pembuatan laporan tertulis untuk mencatat hasil sidang/rapat dan kegiatan DPRD;

- k. Melaksanakan penyusunan materi rancangan peraturan perundang-undangan produk DPRD melalui koordinasi dengan instansi terkait, meneliti dan mengolah data sesuai ketentuan;
- l. Melaksanakan dokumentasi hasil sidang/rapat DPRD melalui koordinasi dan peliputan acara DPRD untuk mendokumentasikan pelaksanaan tugas DPRD
- m. Melaksanakan pembinaan dan penilaian Prestasi Kerja kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sehubungan dengan bidang tugas pekerjaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Kepala Bagian Persidangan, Risalah Dan Humas, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Subbagian yaitu:

1. Kepala Subbagian Persidangan Dan Protokol;

Kepala Subbagian Persidangan Dan Protokol mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan persidangan/rapat dan kegiatan protokoler DPRD.

2. Kepala Subbagian Risalah Dan Peraturan Perundang-undangan

Kepala Subbagian Risalah Dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan risalah hasil sidang/rapat dan kegiatan DPRD serta penyusunan materi rancangan peraturan perundang-undangan produk DPRD.

3. Kepala Subbagian Humas Dan Dokumentasi

Kepala Subbagian Humas Dan Dokumentasi mempunyai tugas mendokumentasikan hasil persidangan/rapat DPRD dan perpustakaan.

3) Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Sekretaris Dewan.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga dan perlengkapan DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas ,Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan surat menyurat, arsip/ekspedisi, perjalanan dinas, dan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- c. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan DPRD;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bagian Umum dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis Bagian Umum dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bagian Umum supaya tugas dilaksanakan sesuai ketentuan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan Bagian Umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan Bagian Umum dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien;
- g. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip/ekspedisi dan perjalanan dinas melalui koordinasi dan pembinaan guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan;
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD melalui koordinasi, mempelajari data dan pembinaan guna tertib administrasi kepegawaian;
- i. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan DPRD melalui koordinasi, mempelajari data, pembinaan dan pengawasan guna tertib administrasi keuangan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan DPRD melalui koordinasi, mempelajari data dan pembinaan guna kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan Penilaian Prestasi Kerja kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sehubungan dengan bidang tugas pekerjaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Kepala Bagian Umum, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Subbagian yaitu:

1. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola surat menyurat, arsip/ekspedisi, perjalanan dinas, dan administrasi kepegawaian.

2. Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengelola keuangan dan perbendaharaan.

3. Kepala Subbagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan

Kepala Subbagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola rumah tangga dan perlengkapan DPRD.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan out sourcing, dan sampai dengan bulan Januari 2017 berjumlah 42 orang dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD : 1 orang
- b. Bagian Umum : 1 orang
 - Sub Bagian Tata Usaha : 9 orang
 - Sub Bagian Keuangan : 6 orang
 - Sub Bagian Rumah Tangga & Perlengkapan : 6 orang
- c. Bagian Persidangan, Risalah dan Hubungan Masyarakat : 1 orang
 - Sub Bagian Persidangan & Protokol : 5 orang
 - Sub Bagian Risalah & Perundang-undangan : 3 orang
 - Sub Bagian Hubungan Masyarakat & Dokumentasi : 3 orang
- d. Out sourcing : 7 orang

Keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan pendidikan, golongan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan :

Gambaran mengenai pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan Januari 2017 sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Data Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Bulan Januari 2017

No	BIDANG	PENDIDIKAN (orang)						Total (orang)	
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1		S2
1	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Bagian Umum	-	1	9	1	-	10	-	21
3	Persidangan, Risalah dan Humas	-	-	3	-	-	10	-	13
4	Out Sourcing	-	-	7	-	-	-	-	7
Jumlah (orang)		0	1	19	1	0	21	0	42
Persentase (%)		0	2,4	45,2	2,4	0	50	0	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD yang paling rendah adalah SMP (2,4%) dan tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah Strata 1/Sarjana (50%). Adapun persentase pegawai Sekretariat DPRD sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sebesar 50%.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan jenis kelamin sampai dengan Bulan Januari 2017, dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Bulan Januari 2017

No	BIDANG	Jenis Kelamin (orang)		Total (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretaris	1	-	1
2	Bagian Umum	14	7	21
3	Persidangan, Risalah dan Humas	8	5	13
4	Out Sourcing	6	1	7
Jumlah (orang)		29	13	42
Persentase (%)		69,05	30,95	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh bahwa jumlah pegawai laki-laki (69,05%) lebih banyak dibandingkan perempuan (30,95%). Apabila dilihat dari sebarannya hampir disemua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

Selanjutnya jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan pangkat/golongan ruang dan jabatan serta jenis kelamin sampai dengan bulan Januari 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Berdasarkan Pangkat/golongan ruang dan jabatan
serta Jenis Kelamin s/d Bulan Januari 2017

No	JABATAN	ASN Golongan (orang)								Total (orang)
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Bagian	-	2	-	-	-	-	-	-	2
3	Kepala Sub Bagian	-	-	3	3	-	-	-	-	6
4	Analisis Anggaran	-	-	1	1	-	-	-	-	2
5	Pengadministrasian umum			6	6	8	3			23
6	Pengemudi	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah (orang)		1	2	10	10	9	3	0	0	35
Persentase (%)		2,86	5,71	28,57	28,6	25,71	8,57	0	0	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

Dan untuk data tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan jenis kelamin sampai dengan bulan Januari 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Data Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Bulan Januari 2017

No	BIDANG	Jenis Kelamin (orang)		Total (orang)	%
		Laki- Laki	Perempuan		
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	0	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	1	1	2,38
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	15	4	19	45,24
4	Diploma I	1	-	1	2,38
5	Diploma III	-	-	0	0
6	Diploma IV	-	-	0	0
7	Sarjana Strata-1	10	11	21	50
8	Sarjana Strata-2	-	-	0	0
Jumlah (orang)		26	16	42	
Persentase (%)		61,90	38,10	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

Dari Tabel 2.4 menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.4, tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD yang paling banyak adalah berpendidikan S-1 sebanyak 21 orang (50%) dan SMA sebanyak 19 orang (45,24%). Tingkat pendidikan dari sebagian besar pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang relatif tinggi ini merupakan kekuatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk peningkatan kinerja.

Untuk menghadapi tantangan kedepan, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan formal yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berada di Jalan Alun-alun utara nomor 2 Kajen Kabupaten Pekalongan, Lokasi kantor Sekretariat DPRD yang sangat strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju Sekretariat DPRD, dan berdekatan dengan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan memberi peluang untuk memudahkan dalam hal koordinasi dengan Bupati dan jajaranya, sehingga lebih cepat dalam penyampaian informasi mengenai urusan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dapat terlaksana dengan baik bukan hanya didukung oleh sumber daya manusia yang terampil saja, tetapi harus didukung ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan secara umum jumlah asset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatannya sampai dengan Januari 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Asset Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan s/d Bulan Januari 2017

No	NAMA BARANG/JENIS BARANG	Jumlah	KEADAAN BARANG		
			BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)
1	Kendaraan roda 4	38	38	-	-
2	Kendaraan roda 2	8	8	-	-
3	Kendaraan roda 3	1	1	-	-
4	Lemari Penyimpan	4	4	-	-
5	Mesin foto copy	1	-	1	-
6	Lemari Besi/Metal	33	33	-	-

No	NAMA BARANG/JENIS BARANG	Jumlah	KEADAAN BARANG		
			BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)
7	Rak Besi/Metal	2	-	2	-
8	Rak Kayu	3	3	-	-
9	Filling Besi/Metal	21	18	3	-
10	Filling Kayu	1	1	-	-
11	Brankas	1	1	-	-
12	Lemari Kaca	7	7	-	-
13	Lemari Makan	3	3	-	-
14	Papan Pengumuman	6	6	-	-
15	Mesin Absensi	1	1	-	-
16	Over Head Projector	2	2	-	-
17	Lemari Kayu	6	6	-	-
18	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3	3	-	-
19	Meja Rapat	106	106	-	-
20	Meja Tulis	38	38	-	-
21	Meja Makan	5	5	-	-
22	Meja Podium	2	2	-	-
23	Kursi Rapat	263	263	-	-
24	Kursi Tamu	19	19	-	-
25	Kursi Putar	10	10	-	-
26	Kursi Biasa	1	1	-	-
27	Kursi Lipat	136	118	18	-
28	Meja Komputer	19	19	-	-
29	Kasur	9	-	9	-

No	NAMA BARANG/JENIS BARANG	Jumlah	KEADAAN BARANG		
			BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)
30	Bantal	15	-	15	-
31	Guling	6	-	6	-
32	Waslap	3	3	-	-
33	Sprei	13	-	13	-
34	Sofa	2	2	-	-
35	Lemari Pakaian	7	7	-	-
36	Lemari Rias	2	2	-	-
37	Karpet	2	1	1	-
38	Kursi Plastik	3	3	-	-
39	Gordyn	155	125	30	-
40	Jam Mekanis	28	-	28	-
41	Mesin Penghisap debu	1	1	-	-
42	Mesin Cuci	1	-	1	-
43	Lemari Es	10	10	-	-
44	AC Unit	45	44	-	1
45	Kipas Angin	4	4	-	-
46	Exhause Fan	8	8	-	-
47	Kompore Gas	4	-	4	-
48	Alat dapur lainnya	24	-	21	3
49	Tabung Gas	3	3	-	-
50	Alat Pemanas	1	1	-	-
51	Televisi	11	10	1	-
52	Cassette Recorder	4	-	4	-

No	NAMA BARANG/JENIS BARANG	Jumlah	KEADAAN BARANG		
			BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)
53	Sound System	2	2	-	-
54	Wireless	5	4	1	-
55	Mic Conference	3	2	1	-
56	Unit Power Supply (UPS)	3	3	-	-
57	Camera Video	1	10	1	-
58	Camera Film	11	1	10	-
59	Lambang Garuda Pancasila	17	17	-	-
60	Gambar Presiden/Wakil Presiden	20	20	-	-
61	Aquarium	1	-	1	-
62	Tiang Bendera	3	-	3	-
63	Dispencer	12	4	6	2
64	Palu Sidang	6	6	-	-
65	Handy Cam	4	-	-	4
66	Alat Pemadam/Portable	5	5	-	-
67	Mainframe	3	3	-	-
68	P.C. Unit	15	15	-	-
69	Lap Top	31	20	1	10
70	Printer	29	29	-	-
71	Scanner	1	1	-	-
72	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	5	5	-	-
73	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
74	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-	-
75	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	5	-	-

No	NAMA BARANG/JENIS BARANG	Jumlah	KEADAAN BARANG		
			BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)
76	Meja kerja pegawai nin struktural	1	1	-	-
77	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	11	11	-	-
78	Meja Operator	1	1	-	-
79	Kursi Kerja Ketrua/Wakil DPRD	23	23	-	-
80	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
81	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-	-
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	5	-	-
83	Lemari buku untuk Perpustakaan	1	1	-	-
84	Buffet Kayu	5	5	-	-
85	Proyektor + Attachment	3	3	-	-
86	Audio Cassette Recorder	4	4	-	-
87	Telephone (PABX)	13	13	-	-
88	Telephone Mobile	45	45	-	-
89	Handy Talky (HT)	4	2	2	-
90	Facsimile	1	1	-	-
91	Antena SHF portabel	1	-	1	-
92	Mesin Power Station White Emergency Diesel Generating	2	-	2	-
93	Alat Tenis Meja	1	1	-	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Kinerja Sekretariat DPRD diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pekalongan dengan memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan melalui serangkaian program dan

kegiatan baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerinah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Sekretariat DPRD memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari:

- 1) Enam fraksi : PKB, PDIP, Partai Golkar, PAN, Merah putih, PPS
- 2) Empat komisi : Komisi A (Pemerintahan), Komisi B (Perekonomian), Komisi C (Pembangunan), Komisi D (Kesejahteraan)
- 3) Badan Musyawarah
- 4) Badan Kehormatan
- 5) Badan Legislasi Daerah
- 6) Badan Anggaran
- 7) Panitia Khusus

Adapun pencapaian kinerja pelayanan yang diberikansektariat DPRD kabupaten Pekalongankepada 45 (empatpuluh lima) orang anggota DPRD KabupatenPekalonganyang telah dicapai dalam kurun waktu 2011 – 2015 menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Pemerintah Daerah periode sebelumnya, dan atau indikator kinerja pelayanan Pemerintah Daerah dan atau indikator lainnya yaitu indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk non urusan.

Tabel 2.6 berikut ini merupakan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2015:

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, untuk itu perlu memanfaatkan beberapa peluang yang bisa mendukungnya, antara lain:

- 1) Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah melalui anggota DPRD
- 2) Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada anggota DPRD
- 3) Sistem pemerintahan yang terbuka sehingga instansi, lembaga dan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD secara langsung.
- 4) Kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam melayani anggota DPRD, sehingga anggota DPRD lebih cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan organisasi merupakan tantangan yang harus diantisipasi oleh Sekretariat DPRD dalam penyusunan strategi dan kebijakan pelayanan kepada anggota DPRD, tantangan tersebut antara lain:

- 1) Tuntutan masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang harus diperhatikan dalam pelayanan anggota DPRD kepada masyarakat.
- 2) Perubahan kebijakan nasional/peraturan perundang-undangan yang sangat cepat menyebabkan ketidaksiapan Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada anggota DPRD.
- 3) Belum optimalnya hasil pelayanan kepada masyarakat karena masih terdapatnya pemahaman yang simpang siur akan tugas pokok fungsi DPRD.
- 4) Rendahnya kapasitas dan pengetahuan Pemerintah Daerah terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu organisasi Pemerintah daerah yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dituntut semakincepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintah dan politik yang ada.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama kurun waktu lima tahun kebelakang, tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Tugas pokok: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

No	Fungsi	Permasalahan
1.	Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD	a. Belum optimalnya peran aparatur dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia b. Adanya kurang pahaman antar

No	Fungsi	Permasalahan
		<p>aparatur atas tugas pokok dan fungsinya masing-masing</p> <p>c. Jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>d. Kurang adanya pelatihan yang tepat agar bisa memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal</p>
2.	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	<p>a. Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan.</p> <p>b. Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belum optimal</p> <p>c. Belum tersusunnya pola pengarsipan SPJ yang baik sehingga kesulitan pencarian dokumen</p>
3.	Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD	<p>a. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat</p> <p>b. Dalam pelaksanaannya rapat-rapat tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, karena penyesuaian dengan proses dan mekanisme kegiatan yang ada.</p> <p>c. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penentuan jadwal rapat.</p>
4.	Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD	<p>a. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku membuat penyelesaian penyusunan</p>

No	Fungsi	Permasalahan
		perda yang kurang tepat waktu. b. Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD.

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021.

Orientasi pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun yang akan datang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2016 – 2021. Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2016 – 2021 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Sejahtera	merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, berpartisipasi dalam

	kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar rakyat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedia sarana prasarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik
Religius	merupakan kondisi masyarakat yang memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap agama, kepercayaan, dan keyakinan yang diyakininya. Kondisi masyarakatnya saling menghormati agama, kepercayaan dan keyakinan agama lain, beriman dan bertakwa yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari
Berkelanjutan	yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya
Berbasis Potensi Lokal	yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainnya, potensi ekonomi, potensi sumberdaya alam lainnya serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol dan berkelanjutan

Sumber : RPJMD Kab. Pekalongan 2016-2021

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan **14 (Empat Belas) Program Prioritas**, yaitu

- (1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- (2) Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- (3) Program Pengembangan Destinasi Wisata..
- (4) Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- (5) Program Pembangunan Pusat Laboratorium Alam Perubahan Iklim Petungkriyono;
- (6) Program Peningkatan Daya Saing Daerah berbasis Potensi Lokal;
- (7) Program Pengembangan Kawasan Industri;
- (8) Program Peningkatan Kedaulatan Pangan;
- (9) Program Peningkatan Sistem Pelayanan Publik;
- (10) Program Peningkatan Keamanan dan Budaya Tertib Masyarakat
- (11) Program Pemerataan Pembangunan Infrastruktur;
- (12) Program Penataan Permukiman Kumuh;
- (13) Program Pengendalian Banjir dan Rob;
- (14) Program Pendirian BUMD;

Berkaitan dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pekalongan tersebut, maka Sekretariat DPRD sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Pekalongan selama lima tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan antara lain:

1. Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana
2. Lembaga yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD sehingga memiliki akses langsung untuk koordinasi.
3. Disiplin kerja pegawai yang tinggi
4. Pengetahuan tentang kebijakan, peraturan, dan birokrasi Pemerintah Daerah lain.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan adalah:

1. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi informasi untuk melakukan pelayanan kepada anggota DPRD
2. Belum optimalnya kapasitas, kuantitas dan kualitas SDM dalam melakukan pelayanan kepada anggota DPRD
3. Belum optimalnya koordinasi dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat melalui anggota DPRD.
4. Kurangnya Konsistensi antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya.

3.2.1 Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian DPR RI 2016 - 2019

Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan awal RPJMN. Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019 merupakan revisi terhadap Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2015-2019 yang dilakukan karena adanya perubahan struktur organisasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal DPR RI seperti diamanatkan dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2014.

Telaahan terhadap Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas

antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi : "Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI"

Sesuai dengan kedudukannya yang strategis dalam pemberian dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI harus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, pengertian kata profesional, andal, transparan, dan akuntabel adalah:

- 1) Profesional : Mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.
- 2) Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- 3) Transparan : Kesiediaan untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan organisasi, serta tugas dan fungsi DPR RI.
- 4) Akuntabel : Mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI.

- b. Misi :

- 1) Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.
- 2) Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel

Tujuan merupakan penjabaran visi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang hendak dicapai. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah:

1. Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI;
2. Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Adapun ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk kedua tujuan tersebut dijelaskan dalam sasaran program.

Sasaran program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Setjen dan Badan keahlian DPR RI yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Adapun sasaran program Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal, hal ini tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Terasiliasinya persidangan komisi-komisi, Pripurna, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Pimpinan DPR RI, serta terselenggaranya pemberitaan parlemen secara baik;
 - b. Tersedianya dukungan teknis dan administrasi, serta sarana dan prasarana yang memadai;
 - c. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan intern yang ditindaklanjuti;
 - d. Tersedianya referensi kepustakaan, infrastruktur teknologi informasi, kearsipan dan museum, risalah rapat persidangan, serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM;
 - e. Mempertahankan hasil opini BPK berupa "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP);
 - f. Tercapainya peningkatan nilai LAKIP;
 - g. Indeks kepuasan pengguna layanan;

2. Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal, hal ini tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase tersedianya naskah akademik/draf awal RUU/kajian/analisis/referensi/laporan dibidang legislasi, anggaran, dan pengawasan serta isu-isu yang terkait kedewanan yang tepat waktu dan akurat;
 - b. Indeks kepuasan pengguna layanan.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

a. Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2016-2021 terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019

Dalam mendukung pencapaian Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2016-2021 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2016-2021 yaitu **Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip good governance**. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD akan mendukung dalam menghasilkan produk-produk hukum yang berkualitas serta terwujudnya good governance yang akan berdampak pada kualitasnya produk-produk hukum dan good governance ditingkat nasional.

b. Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap sasaran Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019

Secara posisi capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2016-2021 terhadap sasaran Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2016-2021 memiliki sasaran yang sama dengan Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2016-2019 sama-sama berperan dalam mengakomodasi dan menyinergikan kepentingan DPR dengan Pemerintah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pekalongan telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi Kabupaten/kota dan rencana Detail tata ruang (RDTR) sebanyak 19 kecamatan.

Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Sekretariat DPRD hanya mendukung program-program yang terdapat pada RPJMD, dan tidak mempunyai keterkaitan secara langsung terhadap program-program tersebut.

3.4 Perumusan Isu-isu Strategis

Isu –isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, maka isu-isu yang dihadapi sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan SDM dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Sinergitas antara penganggaran dan pelaksanaan
3. Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi
4. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
5. Kedinamisan peraturan perundangan yang berlaku
6. Ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk hukum.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, dan selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran – sasaran yang ingin dicapai.

Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur/kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang dan harus realitis, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
 Tujuan dan sasaran jangka menengah
 Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
 Tahun 2016 – 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase layanan Sekretariat DPRD Kepada DPRD	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata penyelenggaraan pelayanan kesekretariatn DPRD	$\frac{\text{Jumlah dari Prosentase Capaian Kegiatan Pelayanan DPRD}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kegiatan Pelayanan DPRD}} \times 100\%$	89	90	91	92	93	94

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

4.2 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Strategi adalah keseluruhan cara atas langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Rumusan Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah bagi Stakeholder layanan. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (Strategic objective). Melalui parameter tersebut dapat dikenal indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk kebijakan merupakan kumpulan keputusan – keputusan yang :

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan
3. Menciptakan kebijakan mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana diorganisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Dalam pemilihan strategi dengan menggunakan analisa SWOT, identifikasi dilakukan terhadap kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada yang dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Identifikasi Faktor Internal

Faktor internal meliputi **kekuatan(*strenghts*)** dan **kelemahan(*weakness*)** Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang dipandang dapat mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

a. Kekuatan(*strenghts*)

- 1) Lembaga strategis yang menghubungkan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif sehingga mempunyai akses langsung untuk koordinasi dengan Badan Legislatif;
- 2) Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana;
- 3) Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;

b. Kelemahan(*weakness*)

- 1) Belum optimalnya peran aparatur dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia
- 2) Jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan.
- 4) Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belum optimal
- 5) Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat

2. Identifikasi Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi **peluang (*opportunities*)** dan **tantangan (*threats*)** yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang dipandang dapat mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

a. Peluang (*opportunities*)

- 1) Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah melalui anggota DPRD
- 2) Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada anggota DPRD
- 3) Sistem pemerintahan yang terbuka sehingga instansi, lembaga dan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD secara langsung.
- 4) Kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam melayani anggota DPRD, sehingga anggota DPRD lebih cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. Tantangan (*threats*)

- 1) Tuntutan masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang harus diperhatikan dalam pelayanan anggota DPRD kepada masyarakat.
- 2) Perubahan kebijakan nasional/peraturan perundang-undangan yang sangat cepat menyebabkan ketidaksiapan Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada anggota DPRD.
- 3) Belum optimalnya hasil pelayanan kepada masyarakat karena masih terdapatnya pemahaman yang simpang siur akan tugas pokok fungsi DPRD.

- 4) Rendahnya kapasitas dan pengetahuan Pemerintah Daerah terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat.

Dari hasil analisa dan identifikasi faktor internal dan eksternal dalam perumusan strategi dapat dijelaskan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
Penentuan Alternatif Strategi melalui Analisis SWOT

<p align="center">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p align="center">FAKTOR INTERNAL</p>	O. OPPORTUNITY (PELUANG)	T. THREATS (TANTANGAN)
		<p>1) Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah melalui anggota DPRD</p> <p>2) Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada anggota DPRD</p> <p>3) Sistem pemerintahan yang terbuka sehingga instansi, lembaga dan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD secara langsung.</p> <p>4) Kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam melayani anggota DPRD, sehingga anggota DPRD lebih cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.</p>
S. STRENGTH (KEKUATAN)	STRATEGI S+O	STRATEGI S+T
<p>1) Lembaga strategis yang menghubungkan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif sehingga mempunyai akses langsung untuk koordinasi dengan Badan Legislatif;</p> <p>2) Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana;</p> <p>3) Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;</p>	<p>1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD dengan memberdayakan aparatur yang tersedia dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah melalui DPRD (S2,S3 : O1)</p> <p>2. Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan (S2,S3:O2)</p> <p>3. Pemanfaatan teknologi informasi secara on line untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD (S2,S3:o3)</p> <p>4. Fasilitasi penanganan permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait (S1:O4)</p> <p>5. Peningkatan disiplin aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRD (S3:O1)</p> <p>6. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (S2:O1)</p>	<p>1. Pemberdayaan aparatur yang ada untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka membantu anggota DPRD untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang beragam. (S2:T1)</p> <p>2. Pengoptimalan ketersediaan bahan referensi sebagai acuan bagi anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (S2;S3:T3)</p> <p>3. Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat. (S1:T2;T4)</p> <p>4. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD (S2;S3:T3)</p> <p>5. Peningkatkan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat (S1:T1)</p>
W . WEAKNESSES (KELEMAHAN)	STRATEGI W+O	STRATEGI W+T
<p>1) Belum optimalnya peran aparatur dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia</p> <p>2) Jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>3) Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan.</p> <p>4) Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belum optimal</p> <p>5) Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat</p>	<p>1. Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali (W1;O1)</p> <p>2. Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung pelayanan DPRD kepada masyarakat (W2;O2)</p> <p>3. Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran program kegiatan sehingga ada sinergitas dalam rangka membantu DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat (W3;W4:O1)</p> <p>4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mobilitas bagi DPRD dan Sekretariat DPRD (W5:O2)</p>	<p>1. Pengoptimalan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD (W1:T1)</p> <p>2. Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah (W3;W4:T2)</p> <p>3. Peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (W1:T3)</p> <p>4. Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD dan keluarganya (W5:T4)</p> <p>5. Pengoptimalan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan (W3:T2)</p>

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

Dari beberapa alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT di atas, maka dipilih beberapa strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3
Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 -2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase layanan Sekretariat DPRD Kepada DPRD	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata penyelenggaraan pelayanan kesekretariatn DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD dengan memberdayakan aparatur yang tersedia 2) Peningkatkan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat 3) Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah 4) Peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 5) Pengoptimalan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD 6) Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat. 7) Peningkatan pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Daerah 8) Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD dan keluarganya 9) Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan 10) Pemanfaatan teknologi informasi secara on line untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD 11) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>12) Pengoptimalan ketersediaan bahan referensi sebagai acuan bagi anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p> <p>13) Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran program kegiatan sehingga ada sinergitas dalam rangka membantu DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat</p> <p>14) Pengoptimalan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>15) Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali</p> <p>16) Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung pelayanan DPRD kepada masyarakat</p> <p>17) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mobilitas bagi DPRD dan Sekretariat DPRD</p> <p>18) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD</p> <p>19) Peningkatan disiplin aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRD</p>

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

Setelah perumusan strategi selanjutnya dirumuskan kebijakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan :

1. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional
2. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten pekalongan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan pertimbangan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi, dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka dirumuskan strategi dan kebijakan sesuai tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 -2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase layanan Sekretariat DPRD Kepada DPRD	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata penyelenggaraan pelayanan kesekretariatn DPRD	1) Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD dengan memberdayakan aparatur yang tersedia 2) Peningkatkan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat 3) Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah 4) Peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 5) Pengoptimalan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD 6) Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada	1) Meningkatkan penyerapan aspirasi dan masukan dari masyarakat melalui kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama serta Reses yang berguna bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah 2) Meningkatkan kualitas produk-produk DPRD sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan rapat paripurna 4) Meningkatkan pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					masyarakat. 7) Peningkatan pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Daerah 8) Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD dan keluarganya 9) Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pekalongan 10) Pemanfaatan teknologi informasi secara on line untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD 11) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 12) Pengoptimalan ketersediaan bahan referensi sebagai acuan bagi anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 13) Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran program kegiatan sehingga ada sinergitas dalam rangka membantu DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat 14) Pengoptimalan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan 15) Pengoptimalan	untuk mengetahui aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah 5) Meningkatkan pelaksanaan kunjungan kerja keluar daerah sebagai sarana konsultasi dan studi komparasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 6) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme DPRD dengan mengikuti DIKLAT, BINTEK dan sosialisasi terkait materi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 7) Mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota beserta keluarganya 8) Memfasilitasi pelantikan PAW DPRD 9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas media cetak sebagai media informasi untuk mempublikasikan kegiatan DPRD dan kontrol masyarakat terhadap

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					<p>pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali</p> <p>16) Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung pelayanan DPRD kepada masyarakat</p> <p>17) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mobilitas bagi DPRD dan Sekretariat DPRD</p> <p>18) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD</p> <p>19) Peningkatan disiplin aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRD</p>	<p>kinerja DPRD</p> <p>10) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna efektifnya penyebaran produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD</p> <p>11) Meningkatkan kualitas penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional, perbaikan peralatan kerja, penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya</p> <p>12) Melakukan penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, makanan dan minuman</p> <p>13) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai bidang kegiatan sebagai sarana memperoleh masukan dalam bidang terkait</p> <p>14) Menyusun laporan-laporan pencapaian kinerja dan</p>

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p>keuangan</p> <p>15) Melakukan pengadaan kendaraan dinas/operasional, perlengkapan rumah jabatan/dinas, peralatan dan perlengkapan kantor yang memadahi baik secara kualitatif maupun kuantitatif</p> <p>16) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai sarana penunjang produktifitas kinerja aparatur untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD dengan melakukan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, mobil jabatan, kendaraan dinas/operasional, perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas, mebeleur, Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas dan gedung kantor, renovasi jaringan listrik</p> <p>17) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur Sekretariat DPRD dengan mengikuti diklat, bintek dan sosialisasi terkait materi yang</p>

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p>menunjang pelaksanaan tugas</p> <p>18) Meningkatkan tanggung jawab dan motivasi kerja aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas DPRD</p> <p>19) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan pelayanan prima</p>

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

Tabel 4.1
 Tujuan dan sasaran jangka menengah
 Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
 Tahun 2016 – 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase layanan Sekretariat DPRD Kepada DPRD	%	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2017

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur, maka Sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan menetapkan program organisasi, indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome program. Secara garis besar program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pekalongan adalah sebagai berikut:

A. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pemerintahan Umum)

1. **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
 - b. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
 - c. Rapat-rapat paripurna
 - d. Kegiatan Reses
 - e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
 - f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
 - g. Penerbitan himpunan SK dan Risalah DPRD
 - h. Penerbitan buletin DPRD
 - i. Penyusunan naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif DPRD
 - j. Pembuatan profil DPRD Kabupaten Pekalongan
 - k. Pembuatan kajian peraturan perundang-undangan
 - l. Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD

- m. Pengelolaan dan penataan kehumasan
- n. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD
- o. Pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan/emotional spiritual quetients (ESQ)
- p. Pelantikan penggantian antar waktu DPRD
- q. Iklan Layanan Masyarakat
- r. Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi
- s. Pelantikan Anggota DPRD Kab.Pekalongan masa jabatan 2019-2024 dan Pimpinan DPRD Kab.Pekalongan masa jabatan 2019-2024
- t. Pembuatan Buku Memory DPRD Kabupaten Pekalongan

B. Non urusan

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran**, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - f. . Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. . Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - k. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD
 - l. Penyediaan makanan dan minuman
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
 - o. . Penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

- c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
- h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
- i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleir
- j. Pemeliharaan rutin/berkala website
- k. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
- l. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
- m. Pengadaan jaringan internet dan perlengkapannya
- n. Pembangunan tempat parkir
- o. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- p. Penambahan daya listrik gedung kantor
- q. Pembangunan mushola dan gazebo rumah dinas
- r. Pengadaan background digital
- s. Pengadaan papan informasi elektronik
- t. Renovasi jaringan instalasi listrik gedung kantor
- u. Pengadaan penghias rumah tangga
- v. Pembuatan DED renovasi gedung DPRD
- w. Aplikasi software jaringan data dan informasi hukum

3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan fokus kegiatan pada:

- a. Pengadaan pakaian dinas

4. Program peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur, dengan fokus kegiatan pada:

- a. Pendidikan dan pelatihan formal

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan dapat dilihat pada Tabel 5.1

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2016 – 2021 hanya mendukung misi ke 4 RPJMD Kabupaten Pekalongan yaitu: menyelenggarakan birokrasi Pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.

BAB VII

PENUTUP

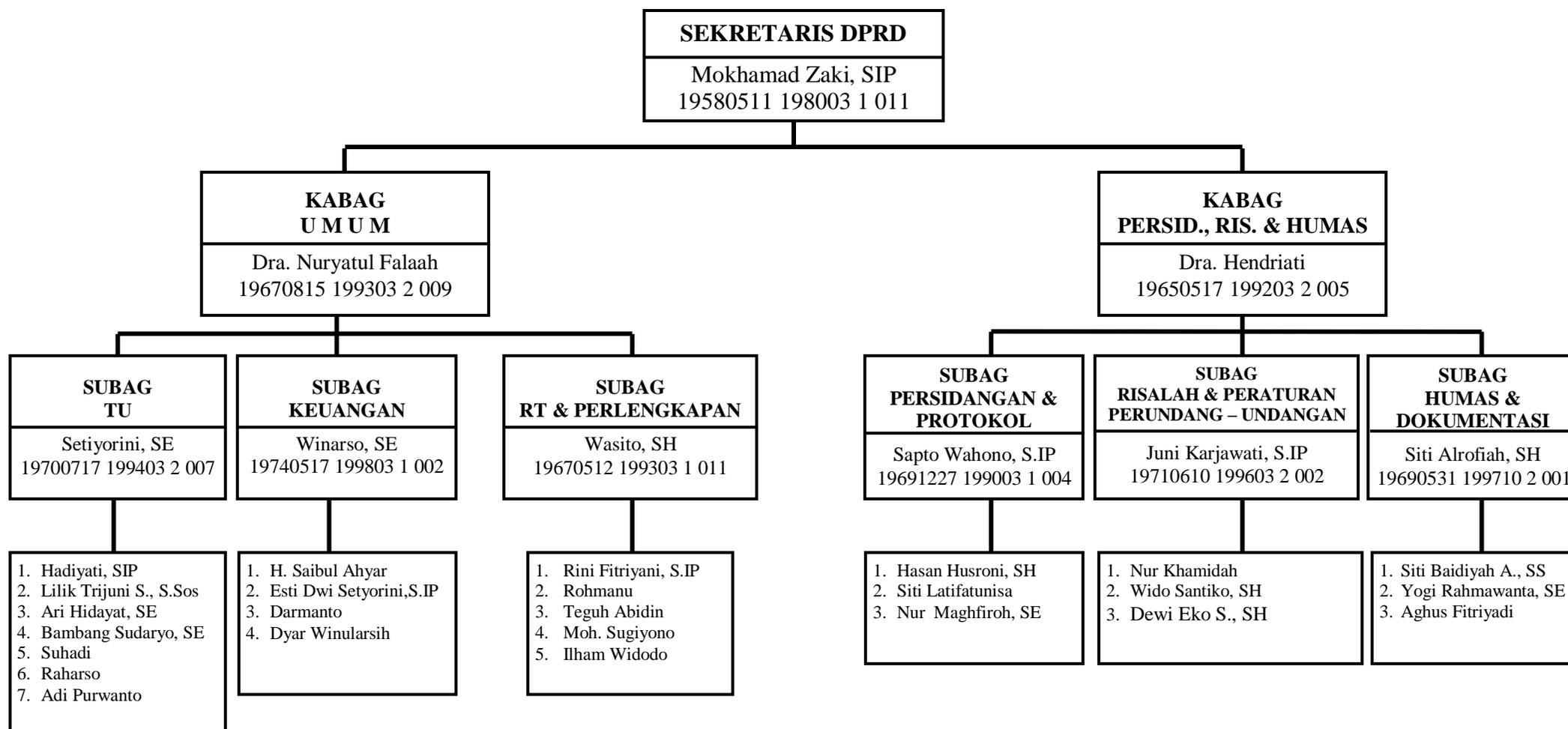
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan 2016 - 2021 serta disesuaikan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2016-2021 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

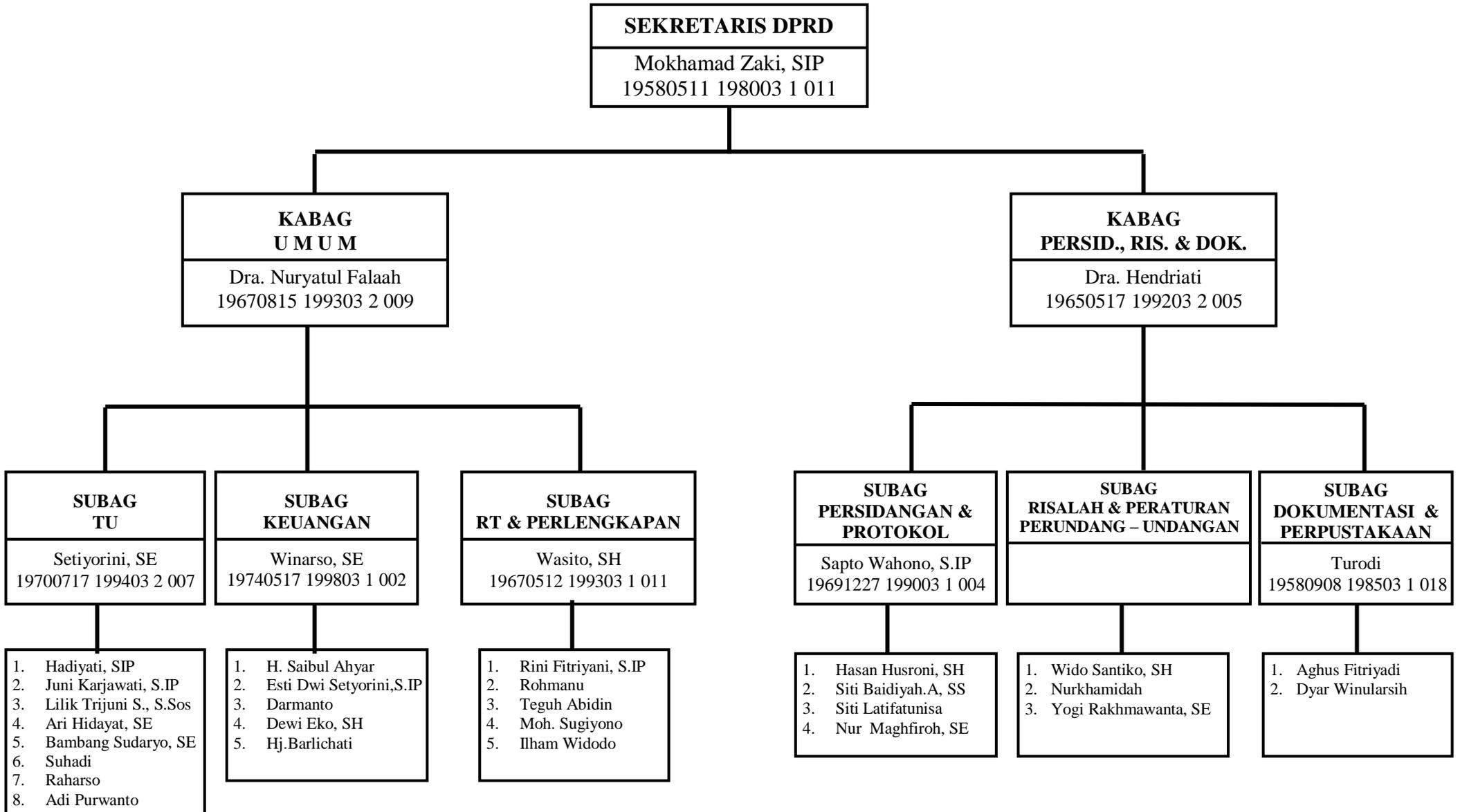
Keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD bergantung pada kemitraan antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta peran serta masyarakat dan *stakeholder* utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja OPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar laporan dan evaluasi atas kinerja tahunan lima tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan pelayanan prima kepada DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan pada umumnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN**



**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN**



SEKRETARIS DPRD

Mokhammad Zaki, SIP
19580511 198003 1 011

**KABAG
UMUM**

Dra. Nuryatul Falaah
19670815 199303 2 009

**KABAG
PERSID., RIS. & DOK.**

Dra. Hendriati
19650517 199203 2 005

**SUBAG
TU**

Setiyorini, SE
19700717 199403 2 007

1. Hadiyati, SIP
2. Juni Karjawati, S.IP
3. Lilik Trijuni S., S.Sos
4. Ari Hidayat, SE
5. Bambang Sudaryo, SE
6. Suhadi
7. Raharso
8. Adi Purwanto

**SUBAG
KEUANGAN**

Winarso, SE
19740517 199803 1 002

1. H. Saibul Ahyar
2. Esti Dwi Setyorini, S.IP
3. Darmanto
4. Dewi Eko, SH
5. Hj.Barlichati

**SUBAG
RT & PERLENGKAPAN**

Wasito, SH
19670512 199303 1 011

1. Rini Fitriyani, S.IP
2. Rohmanu
3. Teguh Abidin
4. Moh. Sugiyono
5. Ilham Widodo

**SUBAG
PERSIDANGAN &
PROTOKOL**

Sapto Wahono, S.IP
19691227 199003 1 004

1. Hasan Husroni, SH
2. Siti Baidiyah.A, SS
3. Siti Latifatunisa
4. Nur Maghfiroh, SE

**SUBAG
RISALAH & PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN**

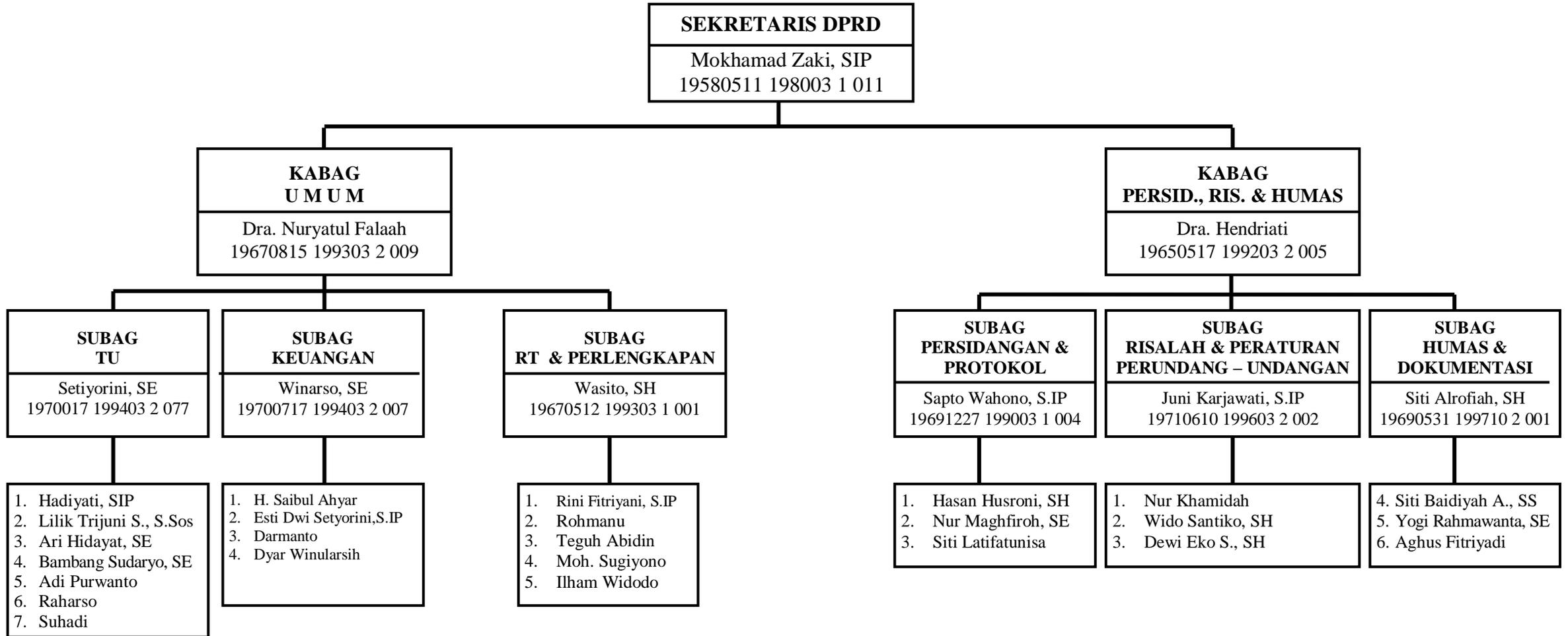
1. Wido Santiko, SH
2. Nurkhamidah
3. Yogi Rakhmawanta, SE

**SUBAG
DOKUMENTASI &
PERPUSTAKAAN**

Turodi
19580908 198503 1 018

1. Aghus Fitriyadi
2. Dyar Winularsih

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN**





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara No. 2 Kajen - Telp. (0285) 381928 - Fax. (0285) 381929
Email : dprdpekalongankab@gmail.com

Kode Pos 51161 - KAJEN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 050/115.1/I/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka seluruh OPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 sebagaimana dalam lampiran ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renstra sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD;
- b. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat DPRD yang mencakup:
 1. Penajaman kembali rumusan tujuan Sekretariat DPRD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD;

2. Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan berdasarkan RPJMD;
3. Penyesuaian program prioritas Sekretariat DPRD yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
4. Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan fungsi);
5. Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
6. Penyusunan rancangan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Renstra OPD.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KAJEN
Pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN

MOKHAMAD ZAKI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19580511 198003 1 011

Tembusan Yth

1. Bupati Pekalongan;
2. Tim Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan.

Lampiran I Surat Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Pekalongan
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

No.	NAMA/NIP.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MOKHAMAD ZAKI,S.IP NIP. 19580511 198003 1 011	Sekretaris	Ketua
2.	Dra. NURYATUL FALAAH NIP. 19670815 199303 2 009	Kepala Bagian Umum	Sekretaris
3.	Dra. HENDRIATI NIP. 19650517 199203 2 005	Kabag Persid, Risalah dan Humas	Anggota
4.	SITI ALROFIYAH, SH NIP. 19690531 199710 2 001	Kasubag Humas dan Dokumentasi	Anggota
5.	SETIYORINI, SE NIP. 19700717 199403 2 007	Kasubag Tata Usaha	Anggota
6.	WASITO, SH NIP. 19670512 199303 1 001	Kasubag RT dan Perlengkapan	Anggota
7.	SAPTO WAHONO, S.IP NIP. 19691227 199003 1 004	Kasubag Persidangan dan Protokol	Anggota
8.	WINARSO, SE NIP. 19740517 199803 1 002	Kasubag Keuangan	Anggota
9.	JUNI KARJAWATI, S.IP NIP. 19710610 199603 2 002	Kasubag Risalah dan Perundang-undangan	Anggota
10.	BAMBANG SUDARYO, SE NIP. 19800620 201502 1 001	Staf	Anggota
11.	MOH. SUGIYONO NIP. 19800916 200901 1 001	Staf	Anggota

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN

MOKHAMAD ZAKI,S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19580511 198003 1 011

FORM L-1
REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD		Tahun 2017				KETERANGAN
	Program/Kegiatan/Indikator	Capaian Tahun 2016	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan /Penunjang Pemerintahan Umum							
Organisasi : Sekretariat DPRD							
I.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				22,074,491,750	17,534,956,772	Tidak Tercapai
	Persentase pencapaian peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (%)	85.10	100	79.43			
	a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama				94,083,000	86,813,000	Tidak Tercapai
	- Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	3	24 kali	23 kali			
	b. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan				200,000,000	199,535,000	Melampaui target
	-Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan lancar	- snack = 7290	- snack = 5295 doos	- snack = 7869 doos			
		- makan = 3895	- makan = 5875 doos	- makan = 4430 doos			
	c. Rapat-rapat paripurna				347,000,000	261,500,000	Melampaui target
	- Terlaksananya Rapat-Rapat paripurna dengan lancar		35 kali	43 kali			
	d. Kegiatan Reses				1,595,943,750	1,392,198,050	Sesuai
	- Terlaksananya kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 kali	3 kali	3 kali			
	e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah				492,360,000	182,695,000	Tidak Tercapai
	- Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	34 kali	2160 kali	89 kali			
	f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah				14,112,000,000	11,084,854,102	Sesuai
	- Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	- Luar Pulau = 1 kali	- Luar Pulau = 2 kali	- Luar Pulau = 2 kali			
		- Luar Propinsi = 15 kali	- Luar Propinsi = 23 kali	- Luar Propinsi = 23 kali			
		- Dalam Propinsi = 13 kali	- Dalam Propinsi = 22 kali	- Dalam Propinsi = 22 kali			
		- Eks Karisidenan = 4 kali					
	g. Penerbitan himpunan SK dan Risalah DPRD				18,550,000	17,350,000	Sesuai

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD		Tahun 2017				KETERANGAN
	Program/Kegiatan/Indikator	Capaian Tahun 2016	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
	- Tersedianya buku himpunan SK dan Risalah DPRD	- Himpunan SK DPRD Th 2016= 60 buku	- Himpunan SK 50 set	- Himpunan SK 50 set			
		- Himpunan Rislal DPRD = 60 buku	- Risalah DPRD 8 set	- Risalah DPRD 8 set			
	h. Penerbitan buletin DPRD				70,705,000	62,537,720	Sesuai
	- Tersedianya buletin DPRD	0	2460 buku	2460 buku			
	i. Penyusunan naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif DPRD				344,560,000	268,141,000	Sesuai
	- Tersedianya naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif DPRD	2 buah	4 buah	4 buah			
	j. Pembuatan Profil DPRD Kab. Pekalongan				70,000,000	67,315,000	Sesuai
	- Tersedianya DVD dan penggandaanya profil Pimpinan dan Anggota DPRD	0	1 paket master dan 200 buah cd	1 paket master dan 200 buah cd			
	k. Pembuatan kajian peraturan perundang-undangan				233,600,000	201,927,500	Sesuai
	- Tersedianya kajian peraturan perundang-undangan	0	4 paket	4 paket			
	l. Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD				205,050,000	145,050,000	Sesuai
	- Tersedianya tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD	- Tim Ahli DPRD = 2 orang	- Tenaga ahli fraksi = 6 orang	- Tenaga ahli fraksi = 6 orang			
		- Tenaga ahli fraksi = 6 orang					
	m. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD				115,850,000	28,703,600	Sesuai
	- Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	180 orang	45 orang	45 orang			
	n. Pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan/Emotional Spiritual Questionts (ESQ)				3,876,110,000	3,311,638,300	Sesuai
	- Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan/Emotional Spiritual Questionts (ESQ) bagi pimpinan dan anggota DPRD	6 kali	8 kali	8 kali			
	o. Jasa Konsultan Penelitian Kajian Tunjangan Transportasi DPRD				53,000,000	50,886,500	Sesuai
	-Tersedianya jasa konsultan penelitian kajian tunjangan transportasi DPRD	0	1 paket	1 paket			
	p. Pengelolaan dan penataan Kehumasan				20,000,000	19,015,000	Sesuai

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD		Tahun 2017				KETERANGAN
	Program/Kegiatan/Indikator	Capaian Tahun 2016	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
	- Terlaksananya pengelolaan dan penataan kehumasan	0	12 bulan	12 bulan			
	q. Jasa Konsultasi Penelitian Kajian Tunjangan Perumahan DPRD				53,000,000	29,416,500	Sesuai
	Terlaksananya jasa konsultasi penelitian kajian tunjangan ptransportasi DPRD	0	12 bulan	12 bulan			
	r. Penyusunan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD				92,680,000	46,590,000	Sesuai
	- Tersedianya Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	0	1 paket	1 paket			
	s. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD				80,000,000	78,790,500	Sesuai
	- Tersedianya belanja rumah tangga dinas Ketua DPRD	0	4 bulan	4 bulan			
NON URUSAN							
1	Program pelayanan administrasi perkantoran				3,138,475,000	2,905,666,965	
	Prosentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi perkantoran selama lima tahun (%)	88.39	100	92.58			
	a. Penyediaan jasa surat menyurat				43,750,000	30,390,000	Tidak Tercapai
	Tersedianya jasa surat menyurat	- Materai 6000 = 2500 buah	- Materai 6000 = 2745 buah	- Materai 6000 = 1065 buah			
		- Materai 3000 = 2050 buah	- Materai 3000 = 2450 buah	- Materai 3000 = 1000 buah			
		- Perangko Kilat = 0	- Perangko Kilat = 150 buah	- Perangko Kilat = -			
		- Perangko biasa = 0	- Perangko biasa = 12 buah	- Perangko biasa = -			
			- Jasa kurir = 150 kali	- Jasa kurir = 150 kali			
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				248,961,700	216,802,467	Sesuai
	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kelancaran kegiatan DPRD	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				37,800,000	16,835,000	Tidak Tercapai
	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara dengan baik	- Ac Split = 23 unit	- Perbaikan AC split = 11 unit	- Perbaikan AC split = 4 unit			
		- Ac Standing = 8 unit	- Service rutin/berkala AC = 108 kali	- Service rutin/berkala AC = 92 kali			
			- Perbaikan AC Floor 5 pk = 8 unit	-			

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD		Tahun 2017				KETERANGAN
	Program/Kegiatan/Indikator	Capaian Tahun 2016	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
	d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				66,490,000	43,562,200	Tidak Tercapai
	-Tersedianya STNK untuk kendaraan dinas/operasional	- Kend roda 2 = 12 unit	- Kend roda 2 = 11 unit	- Kend roda 2 = 8 unit			
		- Kend roda 4 = 34 unit	- Kend roda 4 = 39 unit	- Kend roda 4 = 39 unit			
	e. Penyediaan jasa administrasi keuangan				41,800,000	36,000,000	Sesuai
	- Terlaksananya pembayaran honorarium pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan dalam rangka terlaksananya tertib administrasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				50,385,000	25,175,000	Tidak Tercapai
	- Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik	36 unit	- Service laptop (berat) = 3 unit	- Service laptop (berat) = 3 unit			
			- Service printer (sedang) = 6 unit	- Service printer (sedang) = 4 unit			
			- Service komputer (berat) = 7 unit	- Service komputer (berat) = 3 unit			
			- Pengisian tabung pemadam kbkaran=4 buah	- Pengisian tabung pemadam kbkaran= 0 buah			
			- Service mesin ketik = 5 unit	- Service mesin ketik = 0 unit			
			- Service gadget = 8 unit	- Service gadget = 7 unit			
			- Refill toner printer = 192 kali	- Refill toner printer = 192 kali			
			- Service mesin FC = 1 tahun	- Service mesin FC = -			
			- service smoke filter = 15 kali	- service smoke filter = 15 kali			
			- perbaikan pompa air = 1 tahun	- perbaikan pompa air = 1 tahun			
			- Perbaikan TV = 7 unit	- Perbaikan TV = 0 unit			
	g. Penyediaan alat tulis kantor				130,000,000	123,774,000	Sesuai
	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan DPRD	1 paket	12 bulan	12 bulan			
	h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				167,500,000	156,778,000	Sesuai
	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	12 bulan	12 bulan			
	i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				15,000,000	14,500,000	Sesuai
	- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	12 bulan	12 bulan			
	j. Penyediaan peralatan rumah tangga				45,856,000	22,600,650	Sesuai

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD		Tahun 2017				KETERANGAN
	Program/Kegiatan/Indikator	Capaian Tahun 2016	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	12 bulan	12 bulan			
	k. Penyediaan makanan dan minuman				267,510,000	260,957,000	Sesuai
	Tersedianya makananan dan minuman untuk rapat sekretariat dan tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				1,711,115,000	1,709,947,648	Sesuai
	- Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan lancar	- Luar Pulau = 1 kali	- Luar Pulau = 2 kali	- Luar Pulau = 2 kali			
		- Luar Propinsi = 13 kali	- Luar Propinsi = 23 kali	- Luar Propinsi = 23 kali			
		- Dalam Propinsi = 15 kali	- Dalam Propinsi = 22 kali	- Dalam Propinsi = 22 kali			
		- Eks Karisidenan = 4 kali					
	m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah				109,345,000	48,395,000	Tidak Tercapai
	- Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan lancar	- PNS Gol. III = 60 kali	- PNS Gol. III = 288 kali	- PNS Gol. III = 182 kali			
		- PNS Gol. II = 60 kali	- PNS Gol. II = 432 kali	- PNS Gol. II = 175 kali			
		- PNS Gol IV = 0	- PNS Gol IV = 72 kali	- PNS Gol IV = 15 kali			
		- Eselon II = 0	- Eselon II = 36 kali	- Eselon II = 15 kali			
	n. Penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya				202,962,300	199,950,000	Sesuai
	- Terbayarnya jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				6,062,642,700	4,607,447,338	
	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	85.16	100	75.99			
	a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional				3,875,000,000	3,157,299,000	Sesuai
	- Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk Pimpinan dan Anggota DPRD		- Station Wagon = 3 unit	- Station Wagon = 3 unit			
			- Hi Ace Commuter M/T = 4 unit	- Hi Ace Commuter M/T = 4 unit			
	b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas				210,000,000	183,696,873	Sesuai
	- Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	- Komputer = 1 unit	- Karpet rumah dinas = 1 paket	- Karpet rumah dinas = 1 paket			
		- Printer = 1 unit	- Magic com = 1 unit	- Magic com = 1 unit			
		- TV LED 42" = 1 unit	- Ac split 2 pk = 1 unit	- Ac split 2 pk = 1 unit			
		- Ac Split = 1 unit	- Almari buffet = 2 buah	- Almari buffet = 2 buah			
		- Ac Standing = 1 unit	- Almari pakaian = 2 buah	- Almari pakaian = 2 buah			

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD		Tahun 2017				KETERANGAN
	Program/Kegiatan/Indikator	Capaian Tahun 2016	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		- Sofa tamu = 1 set	- Jam duduk kayu = 1 buah	- Jam duduk kayu = 1 buah			
		- Water Heater = 1 unit	- Kursi dan meja ukir marmer = 1 set	- Kursi dan meja ukir marmer = 1 set			
		- Vacum Cleaner = 1 unit	- Kursi teras = 1 set	- Kursi teras = 1 set			
			- Meja TV = 1 buah	- Meja TV = 1 buah			
			- kulkas mini bar = 1 unit	- kulkas mini bar = 1 unit			
			- Gordyn = 1 paket	- Gordyn = 1 paket			
	c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				50,000,000	48,200,000	Sesuai
	- Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala dengan baik	1 paket	12 bulan	12 bulan			
	d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				90,000,000	87,930,000	Sesuai
	- Terpeliharanya gedung secara rutin/berkala dengan baik	1 paket	12 bulan	12 bulan			
	e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				235,755,000	88,980,413	Sesuai
	- Terpeliharanya kendaraan roda 4 bagi pimpinan DPRD dalam satu tahun	4 unit	4 unit	4 unit			
	f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				600,000,000	277,774,352	Sesuai
	- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas				10,625,000	5,572,500	Tidak Tercapai
	- Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	7 unit	- Perbaikan kompor gas = 1 buah	- Perbaikan kompor gas = 1 buah			
			- Perbaikan dispenser = 1 buah	- Perbaikan dispenser = 1 buah			
			- Perbaikan lemari es = 1 buah	- Perbaikan lemari es = 1 buah			
			- perbaikan AC = 2 unit	- perbaikan AC = 2 unit			
			- Perbaikan water heater = 2 unit	- Perbaikan water heater = 2 unit			
			- perbaikan meja kursi = 1 set	- perbaikan meja kursi = -			
	h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas				5,000,000	3,825,000	Sesuai
	- Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas	4 unit	- Perbaikan telp/Faximille = 1 unit	- Perbaikan telp/Faximille = 1 unit			
			- Tv kabel = 1 unit	- Tv kabel = 1 unit			
			- Service TV = 2 unit	- Service TV = 2 unit			
	i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				70,000,000	-	Tidak Tercapai
	- Terpeliharanya mebeulair secara rutin/berkala	- Kursi Putar = 10 buah	- Kursi Tamu = 17 set	-			
		- lemari besi = 8 buah	- Kursi putar = 15 buah				
			- Kursi lipat = 10 buah				

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD		Tahun 2017				KETERANGAN
	Program/Kegiatan/Indikator	Capaian Tahun 2016	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			- Almari arsip = 4 buah				
			- Filling cabinet = 4 buah				
	j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				115,000,000	113,574,000	Sesuai
	- Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor sedang/berat	1 paket	1 paket	1 paket			
	k. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				362,515,500	356,035,500	Sesuai
	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	- Alat absensi = 1 unit	- Mesin Foto Copy = 1 unit	- Mesin Foto Copy = 1 unit			
		- Ac Split = 12 unit	- Ac Split 2 pk = 2 unit	- Ac Split 2 pk = 2 unit			
		- Ac standing floor 5 PK = 1 unit	- Meja Kerja = 2 unit	- Meja Kerja = 2 unit			
		- Smokestop filter = 8 unit	- Kursi kerja = 2 unit	- Kursi kerja = 2 unit			
		- TV LED 32' = 3 unit	- Almari arsip 2 pintu = 2 unit	- Almari arsip 2 pintu = 2 unit			
		- Komputer note book = 9 unit	- Gordyn Ruang Kom ABCD & Loby Sek = 1 paket	- Gordyn Ruang Kom ABCD & Loby Sek = 1 paket			
		- Printer = 8 unit	- LCD proyektor = 6 unit	- LCD proyektor = 6 unit			
		- Almari = 4 unit					
		- Gordyn R.Paripurna lt.1 & Sekwan = 1 paket					
		- Gordyn R.Paripurna lt.2 = 1 paket					
	l. Pengadaan background digital				205,000,000	152,727,500	Sesuai
	- Tersedianya background digital di ruang rapat Paripurna DPRD	0	1 paket	1 paket			
	m. Pengadaan papan informasi elektronik				90,000,000	89,435,000	Sesuai
	- Tersedianya papan informasi elektronik untuk publikasi kegiatan DPRD	0	1 paket	1 paket			
	n. Pengadaan penghias rumah tangga				100,000,000	-	Tidak Tercapai
	- Tersedianya penghias rumah tangga untuk rumah dinas/jabatan	0	- Guci keramik = 1 set	-			
			- Lukisan/foto = 2 buah				
			- Frame foto = 7 buah				
	o. Penambahan daya listrik gedung kantor				43,747,200	42,397,200	Sesuai
	- Terlaksananya penambahan daya listrik gedung kantor	1 paket	12 bulan	12 bulan			
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				190,010,000	111,224,078	

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD		Tahun 2017				KETERANGAN
	Program/Kegiatan/Indikator	Capaian Tahun 2016	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, Bintek koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	58.78	100	58.53			
	Pendidikan dan pelatihan formal				190,010,000	111,224,078	Sesuai
	- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN	5 kali	5 kali	5 kali			
4	Program peningkatan disiplin aparatur				243,187,000	134,954,600	
	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan disiplin aparatur	70.64	100	55.49			
	Pengadaan pakaian dinas				243,187,000	134,954,600	Sesuai
	- Tersedianya pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD	- Pakaian Sipil Harian (PSH) = 90 stell	- Pakaian Sipil Harian (PSH) = 90 stell	- Pakaian Sipil Harian (PSH) = 90 stell			
		- Pakaian dinas sipil resmi (PSR) = 45 stel	- Pakaian dinas sipil resmi (PSR) = 45 stel	- Pakaian dinas sipil resmi (PSR) = 45 stel			
		- Pakaian dinas sipil lengkap (PSL) = 2 stel					
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				655,000,000	506,262,250	
	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	97.29	100	77.29			
	a. Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD				55,000,000	44,819,250	Sesuai
	-Terpeliharanya website DPRD secara rutin/berkala	12 bulan	1 paket	1 paket			
	b. Iklan Layanan Masyarakat				600,000,000	461,443,000	Sesuai
	- Terlaksananya penyebaran informasi kinerja DPRD melalui media cetak dan elektronik	0	12 bulan	12 bulan			
JUMLAH					32,363,806,450	25,800,512,003	

Kajen, 19 Januari 2017
Mengetahui,
Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Mokhamad Zaki, S.IP

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD		Tahun 2017				KETERANGAN
	Program/Kegiatan/Indikator	Capaian Tahun 2016	TARGET KINERJA	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	

NIP. 19580511 198003 1 011

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja

telp	2
laptop	3
printer	6
PC	7
risograph	4
tabung pmdm	4
mesin tik	2
gadget	8

refil 192 kalix8bhx12bln

Penyediaan Makanan dan minuman

perub

Snack rapat	480	makan rapat	480
prasmanan	2550	snack+mkn tamu	2400

it-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perubahan

- Keluar Pulau	1
- ke Eks. karisidenan Pekalongan	5

Job Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

- Ac	unit	13
- Smokestop filter	unit	5
- TV LED 32'	unit	2
- Komputer note book	unit	9
- Printer	unit	7
- Gordyn	paket	1
- Kamera digital	unit	6
- Kamera SLR	unit	1

split 12 floor 1

- LCD Proyektor	buah	4
- Mic conference	buah	7
- Mixer sound system	unit	1

almari

4

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							2015	target	Rp	target			Rp	target	Rp										
PEMERINTAHAN UMUM																									
					1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase pencapaian peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	85	100	14,798,941	100	15,094,919	100	15,245,868	100	15,550,786	100	15,861,801	100	15,861,801	100	92,414,116	Setwan	Kajen		
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase layanan Sekretariat DPRD kepada DPRD	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan DPRD		a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	92.87	24 kali	89,855	24 kali	98,841	24 kali	108,725	24 kali	119,598	24 kali	131,558	24 kali	144,714	24 kali	693,291	Setwan	Kajen		
					b. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan lancar	98	12 bulan	180,000	12 bulan	198,000	12 bulan	217,800	12 bulan	239,580	12 bulan	263,538	12 bulan	289,892	12 bulan	1,388,810	Setwan	Kajen		
					c. Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya Rapat-Rapat paripurna dengan lancar	88.29	12 bulan	199,020	12 bulan	218,922	12 bulan	240,814	12 bulan	264,895	12 bulan	291,385	12 bulan	320,524	12 bulan	1,535,560	Setwan	Kajen		
					d. Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	96.83	3 kali	2,655,450	3 kali	2,920,995	3 kali	3,213,095	3 kali	3,534,405	3 kali	38,887,846	3 kali	4,276,631	3 kali	55,488,422	Setwan	Kajen		
					e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	34.57	60 kali	571,600	60 kali	628,760	60 kali	691,636	60 kali	760,800	60 kali	836,880	60 kali	920,568	60 kali	4,410,244	Setwan	Kajen		
					f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	94.86	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	7,828,414	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	8,611,255	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	9,472,381	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	10,419,619	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	11,461,581	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	12,607,739	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	60,400,989	Setwan	Kajen		

92,414,116

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
							Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2015	target	Rp	target			Rp	target	Rp									
					g. Penerbitan himpunan SK dan Risalah DPRD	Tersedianya buku himpunan SK dan Risalah DPRD	89.74	60 buku	18,550	60 buku	20,405	60 buku	22,446	60 buku	24,691	60 buku	27,160	60 buku	29,876	60 buku	143,128	Setwan	Kajen	
					h. Penerbitan buletin DPRD	Tersedianya buletin DPRD	0	-	-	400 eksemplar	70,705	400 eksemplar	77,776	400 eksemplar	85,554	400 eksemplar	94,109	400 eksemplar	103,520	400 eksemplar	431,664			
					i. Penyusunan naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif DPRD	Tersedianya naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif DPRD	84.89	2 buku	175,000	2 buku	192,500	2 buku	211,750	2 buku	232,925	2 buku	256,218	2 buku	281,840	2 buku	1,350,233	Setwan	Kajen	
					j. Pembuatan Profil DPRD Kab. Pekalongan	Tersedianya DVD dan penggunaannya profil Pimpinan dan Anggota DPRD	97.28	-	-	1 paket	70,000	1 paket	77,000	1 paket	84,700	1 paket	93,170	1 paket	102,487	1 paket	427,357			
					k. Pembuatan kajian peraturan perundang-undangan	Tersedianya kajian peraturan perundang-undangan	0	-	-	4 kajian	220,000	4 kajian	242,000	4 kajian	266,200	4 kajian	292,820	4 kajian	322,102	4 kajian	1,343,122			
					l. Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD	Tersedianya tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD	73.7	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	171,120	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	188,232	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	207,055	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	227,761	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	250,537	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	275,591	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	1,320,296	Setwan	Kajen	
					m. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	0	180 orang	360,000	180 orang	396,000	180 orang	435,600	180 orang	479,160	180 orang	527,076	180 orang	579,784	180 orang	2,777,620	Setwan	Kajen	
					n. Pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan/Emotional Spiritual Questionts (ESQ)	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan/Emotional Spiritual Questionts (ESQ) bagi pimpinan dan anggota DPRD	87.08	6 kali	2,435,932	6 kali	2,679,525	6 kali	2,947,478	6 kali	3,242,226	6 kali	3,566,449	6 kali	3,923,094	6 kali	18,794,704	Setwan	Kajen	
					o. Pelantikan penggantian antar waktu DPRD	Terlaksananya pelantikan penggantian antar waktu DPRD	46.06	2 orang	114,000	2 orang	125,400	2 orang	137,940	2 orang	151,734	2 orang	166,907	2 orang	183,598	2 orang	879,579	Setwan	Kajen	

92,414,116

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							2015	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
					p. Pengelolaan dan penataan Kehumasan	Terlaksananya pengelolaan dan penataan kehumasan	0	-	-	12 bulan	20,000	12 bulan	22,000	12 bulan	24,200	12 bulan	29,040	12 bulan	31,944	12 bulan	127,184	Setwan	Kajen
					q. Iklan Layanan Masyarakat	Terlaksananya penyebarluasan informasi kinerja DPRD melalui media cetak dan elektronik	0	-	-	12 bulan	-	12 bulan	660,000	12 bulan	726,000	12 bulan	798,600	12 bulan	878,460	12 bulan	3,063,060	Setwan	Kajen
					r. Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi	Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi	0	0	-	0	0	1 kali	200,000	1 kali	200,000	1 kali	200,000	1 kali	200,000	1 kali	200,000	Setwan	Kajen
					s. Pelantikan Anggota DPRD Kab. Pekalongan masa jabatan 2019 - 2024 dan Pimpinan DPRD Kab. Pekalongan masa jabatan 2019 - 2024	Terlaksananya pelantikan anggota DPRD Kab. Pekalongan masa jabatan 2019-2024 dan Pimpinan DPRD Kab. Pekalongan masa jabatan 2019-2024	0	0	-	0	0	0	-	1 kali	300,000,000	0	-	0	-	0	-	Setwan	Kajen
					t. Pembuatan buku memory DPRD Kab. Pekalongan masa jabatan 2014 - 2019	Tersedianya buku memory DPRD Kab. Pekalongan masa jabatan 2014-2019 sebanyak 150	0	0	-	0	0	0	-	150 buku	100,000,000	0	-	0	-	0	-	Setwan	Kajen
NON URUSAN																							
					1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi perkantoran selama lima tahun (%)	100	20	2,890,764	40	3,179,840	60	3,497,824	80	3,847,606	100	4,232,367	100	4,655,604	100	22,304,005	Setwan	Kajen
Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran terbaik bagi DPRD dan Sekretariat DPRD	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran terbaik bagi DPRD dan Sekretariat DPRD	Terlaksananya kegiatan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran prima bagi DPRD																				
					a. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	98.87	12 bulan	43,750	12 bulan	48,125	12 bulan	52,938	12 bulan	58,232	12 bulan	64,055	12 bulan	70,461	12 bulan	337,561	Setwan	Kajen
					b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kelancaran kegiatan DPRD	80.27	12 bulan	247,962	12 bulan	272,758	12 bulan	300,034	12 bulan	330,037	12 bulan	363,041	12 bulan	399,345	12 bulan	1,913,177	Setwan	Kajen
					c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara dengan baik	61.62	31 unit	37,800	41 unit	41,580	51 unit	45,738	61 unit	50,312	71 unit	55,343	81 unit	60,877	81 unit	291,650	Setwan	Kajen

92,414,116

2795,245
0 SK

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2015	target	Rp	target			Rp											
					d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya STNK untuk kendaraan dinas/operasional	64.7	Kendaraan roda 2 12 unit, kendaraan 4 34 unit	64,260	Kendaraan roda 2 14 unit, kendaraan 4 36 unit	70,686	Kendaraan roda 2 16 unit, kendaraan 4 38 unit	77,755	Kendaraan roda 2 18 unit, kendaraan 4 40 unit	85,531	Kendaraan roda 2 20 unit, kendaraan 4 42 unit	94,084	Kendaraan roda 2 22 unit, kendaraan 4 44 unit	103,492	Kendaraan roda 2 22 unit, kendaraan 4 44 unit	495,808	Setwan	Kajen	
					e. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan dalam rangka terlaksananya tertib administrasi	87.86	12 bulan	41,800	12 bulan	45,980	12 bulan	50,578	12 bulan	55,636	12 bulan	61,200	12 bulan	67,320	12 bulan	322,514	Setwan	Kajen	
					f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik	92.2	36 unit	40,535	39 unit	44,589	42 unit	49,048	46 unit	53,953	50 unit	59,348	55 unit	65,283	55 unit	312,756	Setwan	Kajen	
					g. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan DPRD	100	1 paket	147,496	1 paket	162,246	1 paket	178,471	1 paket	196,318	1 paket	215,950	1 paket	237,545	1 paket	1,138,026	Setwan	Kajen	
					h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	98.68	1 paket	81,993	1 paket	90,192	1 paket	99,211	1 paket	109,132	1 paket	120,045	1 paket	132,050	1 paket	632,623	Setwan	Kajen	
					i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	1 paket	15,000	1 paket	16,500	1 paket	18,150	1 paket	19,965	1 paket	21,962	1 paket	24,158	1 paket	115,735	Setwan	Kajen	
					j. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	99.75	1 paket	90,000	1 paket	99,000	1 paket	108,900	1 paket	119,790	1 paket	131,769	1 paket	144,946	1 paket	694,405	Setwan	Kajen	
					k. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD	Tersedianya belanja rumah tangga dinas Ketua DPRD	0	0	-	0	0	1 paket	504,500	1 paket	554,950	1 paket	610,445	1 paket	671,489	1 paket	2,341,384	Setwan	Kajen	
					k. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat sekretariat dan tamu	96.39	12 bulan	202,561	12 bulan	222,817	12 bulan	245,099	12 bulan	269,609	12 bulan	296,570	12 bulan	326,227	12 bulan	1,562,883	Setwan	Kajen	

92,414,116

1 paket

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							2015	target	Rp			target	Rp										
					l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan lancar	99.85	Keluar Pulau 1 kali, kedlm propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	1,599,999	Keluar Pulau 2 kali, kedlm propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	1,759,999	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	1,935,999	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	2,129,599	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	2,342,559	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	2,576,815	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	12,344,970	Setwan	Kajen
					m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan lancar	32.39	60 kali	100,000	60 kali	110,000	60 kali	121,000	60 kali	133,100	60 kali	146,410	60 kali	161,051	60 kali	771,561	Setwan	Kajen
					n. Penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	Terbayarnya jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	99.91	12 bulan	177,608	12 bulan	195,369	12 bulan	214,906	12 bulan	236,397	12 bulan	260,037	12 bulan	286,041	12 bulan	1,370,358	Setwan	Kajen
					2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	100	20	3,113,961	40	3,425,357	60	3,767,893	80	4,144,682	100	4,559,150	100	5,015,065	100	24,026,108	Setwan	Kajen
Meningkatkan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi DPRD	Prosentase penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang bagi DPRD	Tercukupinya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang yang berkualitas bagi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana bagi DPRD dalam jumlah dan kondisi yang memadai		a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	100	4 unit	874,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,435	Setwan	Kajen
					b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	100	10 unit	110,000	10 unit	121,000	10 unit	133,100	10 unit	146,410	10 unit	161,051	10 unit	177,156	10 unit	848,717	Setwan	Kajen
					c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala dengan baik	99.21	1 rumah	-	1 rumah	50,000	1 rumah	55,000	1 rumah	60,500	1 rumah	66,550	1 rumah	73,205	1 rumah	305,255	Setwan	Kajen

92,414,116

23 kali

60 kali

376789.27 311396

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								2015	target	Rp	target			Rp	target								
					d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung secara rutin/berkala dengan baik	99.84	1 gedung	89,250	1 gedung	98,175	1 gedung	107,993	1 gedung	118,792	1 gedung	130,671	1 gedung	143,738	1 gedung	688,619	Setwan	Kajen
					e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan roda 4 bagi pimpinan DPRD dalam satu tahun	45.78	4 unit	235,755	4 unit	259,331	4 unit	285,264	4 unit	313,790	4 unit	345,169	4 unit	379,686	4 unit	1,818,995	Setwan	Kajen
					f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	72.4	35 unit	535,627	35 unit	589,190	35 unit	648,109	35 unit	712,920	35 unit	784,212	35 unit	862,633	35 unit	4,132,691	Setwan	Kajen
					g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	48.69	9 unit	10,625	9 unit	11,688	9 unit	12,857	9 unit	14,143	9 unit	15,557	9 unit	17,113	9 unit	81,983	Setwan	Kajen
					h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas	50	4 unit	5,000	4 unit	5,500	4 unit	6,050	4 unit	6,655	4 unit	7,321	4 unit	8,053	4 unit	38,579	Setwan	Kajen
					i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur secara rutin/berkala	0	1 paket	20,000	1 paket	22,000	1 paket	24,200	1 paket	26,620	1 paket	29,282	1 paket	32,210	1 paket	154,312	Setwan	Kajen
					j. Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD	Terpeliharanya website DPRD secara rutin/berkala	99.17	12 bulan	-	0	0	12 bulan	64,678	12 bulan	71,146	12 bulan	78,261	12 bulan	86,087	12 bulan	300,172	Setwan	Kajen
					k. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas sedang/berat	0	1 rumah	250,000	1 rumah	275,000	1 rumah	302,500	1 rumah	332,750	1 rumah	366,025	1 rumah	402,628	1 rumah	1,928,903	Setwan	Kajen
					l. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor sedang/berat	0	1 gedung	-	1 gedung	115,000	1 gedung	126,500	1 gedung	139,150	1 gedung	153,065	1 gedung	168,372	1 gedung	702,087	Setwan	Kajen
					m. Pengadaan jaringan Internet dan perlengkapannya	Tersedianya jaringan Internet dan perlengkapannya	0	1 unit	10,000	1 unit	11,000	1 unit	12,100	1 unit	13,310	1 unit	14,641	1 unit	16,105	1 unit	77,156	Setwan	Kajen
					n. Pembangunan tempat parkir	Tersedianya tempat yang dibangun untuk parkir	0	1 tempat	100,750	1 tempat	110,825	1 tempat	121,908	1 tempat	134,099	1 tempat	147,509	1 tempat	162,260	1 tempat	777,351	Setwan	Kajen
					o. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	95.38	10 unit	588,782	10 unit	647,660	10 unit	712,426	10 unit	783,669	10 unit	862,036	10 unit	948,240	10 unit	4,542,813	Setwan	Kajen
					p. Penambahan daya listrik gedung kantor	Terlaksananya penambahan daya listrik gedung kantor	0	0	-	1 unit	185,000	1 unit	203,500	1 unit	223,850	1 unit	246,235	1 unit	270,859	1 unit	1,129,444	Setwan	Kajen

92,414,116

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2015	target	Rp	target			Rp											
					q. Pembangunan mushola dan gazebo rumah dinas	Tersedianya mushola dan gazebo di rumah dinas	0	1 Mushola dan 1 gazebo	197,700	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Mushola dan 1 gazebo	197,700	Setwan	Kajen	
					r. Pengadaan background digital	Tersedianya background digital di ruang rapat Paripurna DPRD	0	0	-	1 unit	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	205,000	Setwan	Kajen	
					s. Pengadaan papan informasi elektronik	Tersedianya papan informasi elektronik untuk publikasi kegiatan DPRD	0	0	-	1 unit	90,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit	90,000	Setwan	Kajen	
					t. Renovasi Jaringan instalasi listrik gedung kantor	Tersedianya jaringan instalasi listrik gedung kantor yang memadahi	0	1 unit	86,036	1 unit	94,640	1 unit	104,104	1 unit	114,514	1 unit	125,965	1 unit	138,562	100	663,821	Setwan	Kajen	
					u. Pengadaan penghias rumah tangga	Tersedianya penghias rumah tangga untuk rumah dinas/jabatan	0	0	-	5 unit	100,000	5 unit	110,000	5 unit	121,000	5 unit	133,100	5 unit	146,410	100	610,510	Setwan	Kajen	
					v. Pembuatan DED Renovasi gedung DPRD	Tersedianya dokumen perencanaan renovasi gedung DPRD	0	0	-	0	0	1 dokumen	250,000	0	-	0	-	0	-	1 dokumen	250,000	Setwan	Kajen	
					w. Aplikasi software jaringan data dan informasi hukum	Tersedianya aplikasi software jaringan data dan informasi hukum	0	0	-	0	0	1 aplikasi	70,000	0	-	0	-	0	-	1 aplikasi	70,000	Setwan	Kajen	
					3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, BinteK koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	100	20	143,462	40	157,808	60	173,589	80	190,948	100	210,043	100	231,047	100	1,106,897	Setwan	Kajen	
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pelaksanaan pengiriman ASN untuk Diklat, BinteK koordinasi dan konsultasi	Tersedianya aparatur dengan kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang memadahi	Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, BinteK koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja DPRD		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN	50	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	143,462	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	157,808	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	173,589	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	190,948	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	210,043	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	231,047	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	1,106,897	Setwan	Kajen	

92,414,116

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							2015	target	Rp	target			Rp											
					4. Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan disiplin aparatur	100	100	176,020	100	193,622	100	212,984	100	234,282	100	257,710	100	283,481	100	1,358,099	Setwan	Kajen	
Meningkatkan disiplin aparatur	Prosentase pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas disiplin aparatur	Tersedianya aparatur dengan kualitas kedisiplinan yang memadahi untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD	Terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas disiplin aparatur		Pengadaan pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD	73.3	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	176,020	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	193,622	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	212,984	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	234,282	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	257,710	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	283,481	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	1,358,099			
					5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100	20	53,453	20	58,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setwan	Kajen
Meningkatkan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi DPRD	Prosentase penyediaan fasilitas sarana dan prasarana bagi DPRD	Tercukupinya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang yang berkualitas bagi pelaksanaan	Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana bagi DPRD dalam jumlah dan kondisi yang memadahi		a. Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD	Terpeliharanya website DPRD secara rutin/berkala	0	12 bulan	53,453	12 bulan	58,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setwan	Kajen
Mengoptimalkan penyebaran informasi kegiatan-kegiatan dan profil DPRD kepada	Prosentase pencapaian pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Terpublikasikannya kegiatan-kegiatan dan profil DPRD	Tercapainya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		b. Iklan Layanan Masyarakat	Terlaksananya penyebaran informasi kinerja DPRD melalui media cetak dan elektronik	0	0	-	12 bulan	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setwan	Kajen

92,414,116

342536 414468 455915 501507

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							2015	target	Rp	target			Rp	target	Rp										
PEMERINTAHAN UMUM																									
				1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase pencapaian peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan	85	100	14,798,941	100	15,094,919	100	15,245,868	100	15,550,786	100	15,861,801	100	15,861,801	100	92,414,116	Setwan	Kajen			
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tertampungnya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah penyelenggaraan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	92.87	24 kali	89,855	24 kali	98,841	24 kali	108,725	24 kali	119,598	24 kali	131,558	24 kali	144,714	24 kali	693,291	Setwan	Kajen			
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terselenggaranya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan		b. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pelaksanaan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	98	12 bulan	180,000	12 bulan	198,000	12 bulan	217,800	12 bulan	239,580	12 bulan	263,538	12 bulan	289,892	12 bulan	1,388,810	Setwan	Kajen			
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terselenggaranya Rapat-rapat paripurna		c. Rapat-rapat paripurna	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam penyelenggaraan Rapat-rapat paripurna	88.29	12 bulan	199,020	12 bulan	218,922	12 bulan	240,814	12 bulan	264,895	12 bulan	291,385	12 bulan	320,524	12 bulan	1,535,560	Setwan	Kajen			
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tertampungnya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya kegiatan Reses bagi DPRD		d. Kegiatan Reses	Jumlah pelaksanaan kegiatan Reses	96.83	3 kali	2,655,450	3 kali	2,920,995	3 kali	3,213,095	3 kali	3,534,405	3 kali	38,887,846	3 kali	4,276,631	3 kali	55,488,422	Setwan	Kajen			
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah pelaksanaan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	34.57	60 kali	571,600	60 kali	628,760	60 kali	691,636	60 kali	760,800	60 kali	836,880	60 kali	920,568	60 kali	4,410,244	Setwan	Kajen			

92,414,116

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2015	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah		f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah pelaksanaan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	94.86	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	7,828,414	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	8,611,255	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	9,472,381	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali	10,419,619	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	11,461,581	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	12,607,739	1 paket keluar negeri, keluar pulau 2 kali, keluar propinsi 72 kali dan dalam propinsi 48 kali	60,400,989	Setwan	Kajen	
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Tersedianya buku-buku dan Risalah DPRD		g. Penerbitan himpunan SK dan Risalah DPRD	Jumlah buku himpunan SK dan Risalah DPRD	89.74	60 buku	18,550	60 buku	20,405	60 buku	22,446	60 buku	24,691	60 buku	27,160	60 buku	29,876	60 buku	143,128	Setwan	Kajen	
Mengoptimalkan penyebarluasan informasi kegiatan-kegiatan dan profil DPRD kepada masyarakat	Terpublikasikannya kegiatan-kegiatan dan profil DPRD	Tersedianya media cetak buletin untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan DPRD		h. Penerbitan buletin DPRD	Jumlah buletin yang diterbitkan	0	-	400 eksemplar	70,705	400 eksemplar	77,776	400 eksemplar	85,554	400 eksemplar	94,109	400 eksemplar	103,520	400 eksemplar	431,664				
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Tersedianya naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif DPRD		i. Penyusunan naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif DPRD	84.89	2 buku	175,000	2 buku	192,500	2 buku	211,750	2 buku	232,925	2 buku	256,218	2 buku	281,840	2 buku	1,350,233	Setwan	Kajen	
Mengoptimalkan penyebarluasan informasi kegiatan-kegiatan dan profil DPRD kepada masyarakat	Terpublikasikannya kegiatan-kegiatan dan profil DPRD	Tersedianya profil DPRD Kabupaten Pekalongan		j. Pembuatan Profil DPRD Kab. Pekalongan	Jumlah DVD dan penggandaanya profil DPRD yang diterbitkan	97.28	-	1 paket	70,000	1 paket	77,000	1 paket	84,700	1 paket	93,170	1 paket	102,487	1 paket	427,357				
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya pembuatan kajian peraturan perundang-undangan		k. Pembuatan kajian peraturan perundang-undangan	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan	0	-	4 kajian	220,000	4 kajian	242,000	4 kajian	266,200	4 kajian	292,820	4 kajian	322,102	4 kajian	1,343,122				
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Tersedianya tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD		l. Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD	73.7	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	171,120	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	188,232	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	207,055	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	227,761	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	250,537	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	275,591	2 org tim ahli DPRD, 6 org tenaga ahli fraksi	1,320,296	Setwan	Kajen	
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD dan keluarganya	Terlaksananya kegiatan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD dan keluarganya		m. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Jumlah orang yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	0	180 orang	360,000	180 orang	396,000	180 orang	435,600	180 orang	479,160	180 orang	527,076	180 orang	579,784	180 orang	2,777,620	Setwan	Kajen	

92,414,116

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						2015	target	Rp	target			Rp										
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan DPRD	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan/ESQ bagi DPRD		n. Pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan/Emotional Spiritual Questionts (ESQ)	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-	87.08	6 kali	2,435,932	6 kali	2,679,525	6 kali	2,947,478	6 kali	3,242,226	6 kali	3,566,449	6 kali	3,923,094	6 kali	18,794,704	Setwan	Kajen
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terselenggaranya Pelantikan penggantian antar waktu DPRD	Terlaksananya pelantikan penggantian antar waktu DPRD		o. Pelantikan penggantian antar waktu DPRD	Jumlah orang yang dilantik dalam pelantikan penggantian antar waktu DPRD	46.06	2 orang	114,000	2 orang	125,400	2 orang	137,940	2 orang	151,734	2 orang	166,907	2 orang	183,598	2 orang	879,579	Setwan	Kajen
Mengoptimalkan penyebaran informasi kegiatan-kegiatan dan profil DPRD kepada masyarakat	Terpublikasikannya kegiatan-kegiatan dan profil DPRD	Terlaksananya pengelolaan dan penataan kehumasan		p. Pengelolaan dan penataan Kehumasan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka melakukan pengelolaan dan penataan kehumasan	0	-	-	12 bulan	20,000	12 bulan	22,000	12 bulan	24,200	12 bulan	29,040	12 bulan	31,944	12 bulan	127,184	Setwan	Kajen
Mengoptimalkan penyebaran informasi kegiatan-kegiatan dan profil DPRD kepada masyarakat	Terpublikasikannya kegiatan-kegiatan dan profil DPRD	Tercapainya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		q. Iklan Layanan Masyarakat	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyebaran informasi kinerja DPRD melalui media cetak dan	0	-	-	12 bulan	-	12 bulan	660,000	12 bulan	726,000	12 bulan	798,600	12 bulan	878,460	12 bulan	3,063,060	Setwan	Kajen
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terselenggaranya Rapat Paripurna Hari Jadi		r. Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi	Jumlah pelaksanaan rapat paripurna istimewa hari jadi	0	0	-	0	0	1 kali	200,000	1 kali	200,000	Setwan	Kajen						
NON URUSAN																						
				1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi perkantoran selama lima tahun (%)	100	20	2,890,764	40	3,179,840	60	3,497,824	80	3,847,606	100	4,232,367	100	4,655,604	100	22,304,005	Setwan	Kajen
Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran terbaik bagi DPRD dan Sekretariat DPRD	Terlaksananya kegiatan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran prima bagi DPRD dan Sekretariat DPRD		a. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa surat menyurat	98.87	12 bulan	43,750	12 bulan	48,125	12 bulan	52,938	12 bulan	58,232	12 bulan	64,055	12 bulan	70,461	12 bulan	337,561	Setwan	Kajen
				b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	80.27	12 bulan	247,962	12 bulan	272,758	12 bulan	300,034	12 bulan	330,037	12 bulan	363,041	12 bulan	399,345	12 bulan	1,913,177	Setwan	Kajen
				c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	61.62	31 unit	37,800	41 unit	41,580	51 unit	45,738	61 unit	50,312	71 unit	55,343	81 unit	60,877	81 unit	291,650	Setwan	Kajen

92,414,116

2795,245
0 SK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2015	target	Rp	target			Rp	target								
				d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terproses perpanjangannya	64.7	Kendaraan roda 2 12 unit, kendaraan 4 34 unit	64,260	Kendaraan roda 2 14 unit, kendaraan 4 36 unit	70,686	Kendaraan roda 2 16 unit, kendaraan 4 38 unit	77,755	Kendaraan roda 2 18 unit, kendaraan 4 40 unit	85,531	Kendaraan roda 2 20 unit, kendaraan 4 42 unit	94,084	Kendaraan roda 2 22 unit, kendaraan 4 44 unit	103,492	Kendaraan roda 2 22 unit, kendaraan 4 44 unit	495,808	Setwan	Kajen
				e. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pembayaran honorarium pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan dalam rangka terlaksananya tertib administrasi	87.86	12 bulan	41,800	12 bulan	45,980	12 bulan	50,578	12 bulan	55,636	12 bulan	61,200	12 bulan	67,320	12 bulan	322,514	Setwan	Kajen
				f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	92.2	36 unit	40,535	39 unit	44,589	42 unit	49,048	46 unit	53,953	50 unit	59,348	55 unit	65,283	55 unit	312,756	Setwan	Kajen
				g. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100	1 paket	147,496	1 paket	162,246	1 paket	178,471	1 paket	196,318	1 paket	215,950	1 paket	237,545	1 paket	1,138,026	Setwan	Kajen
				h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	98.68	1 paket	81,993	1 paket	90,192	1 paket	99,211	1 paket	109,132	1 paket	120,045	1 paket	132,050	1 paket	632,623	Setwan	Kajen
				i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100	1 paket	15,000	1 paket	16,500	1 paket	18,150	1 paket	19,965	1 paket	21,962	1 paket	24,158	1 paket	115,735	Setwan	Kajen
				j. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	99.75	1 paket	90,000	1 paket	99,000	1 paket	108,900	1 paket	119,790	1 paket	131,769	1 paket	144,946	1 paket	694,405	Setwan	Kajen
				k. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga ketua DPRD	0	0	-	0	0	1 paket	504,500	1 paket	554,950	1 paket	610,445	1 paket	671,489	1 paket	2,341,384	Setwan	Kajen
				k. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam penyediaan makanan dan minuman	96.39	12 bulan	202,561	12 bulan	222,817	12 bulan	245,099	12 bulan	269,609	12 bulan	296,570	12 bulan	326,227	12 bulan	1,562,883	Setwan	Kajen

92,414,116

1 paket

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							2015	target	Rp	target			Rp	target	Rp								
					l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99.85	Keluar Pulau 1 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	1,599,999	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	1,759,999	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	1,935,999	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	2,129,599	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	2,342,559	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	2,576,815	Keluar Pulau 2 kali, kedim propinsi 15 kali, keluar propinsi 13 kali dan eks.karisi denan pekalongan 4 kali	12,344,970	Setwan	Kajen
					m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	32.39	60 kali	100,000	60 kali	110,000	60 kali	121,000	60 kali	133,100	60 kali	146,410	60 kali	161,051	60 kali	771,561	Setwan	Kajen
					n. Penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	99.91	12 bulan	177,608	12 bulan	195,369	12 bulan	214,906	12 bulan	236,397	12 bulan	260,037	12 bulan	286,041	12 bulan	1,370,358	Setwan	Kajen
					2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	100	20	3,113,961	40	3,425,357	60	3,767,893	80	4,144,682	100	4,559,150	100	5,015,065	100	24,026,108	Setwan	Kajen
Meningkatkan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi DPRD	Tercukupinya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang yang berkualitas bagi optimalisasi pelaksanaan tugas dan	Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana bagi DPRD dalam jumlah dan kondisi yang memadai			a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	100	4 unit	874,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,435	Setwan	Kajen
					b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang tersedia	100	10 unit	110,000	10 unit	121,000	10 unit	133,100	10 unit	146,410	10 unit	161,051	10 unit	177,156	10 unit	848,717	Setwan	Kajen
					c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah yang terpelihara secara rutin/berkala	99.21	1 rumah	-	1 rumah	50,000	1 rumah	55,000	1 rumah	60,500	1 rumah	66,550	1 rumah	73,205	1 rumah	305,255	Setwan	Kajen
					d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala	99.84	1 gedung	89,250	1 gedung	98,175	1 gedung	107,993	1 gedung	118,792	1 gedung	130,671	1 gedung	143,738	1 gedung	688,619	Setwan	Kajen

92,414,116

23 kali

60 kali

376789.27 311396

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							2015	target	Rp	target			Rp										
				e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara dalam satu tahun	45.78	4 unit	235,755	4 unit	259,331	4 unit	285,264	4 unit	313,790	4 unit	345,169	4 unit	379,686	4 unit	1,818,995	Setwan	Kajen	
				f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dalam satu tahun	72.4	35 unit	535,627	35 unit	589,190	35 unit	648,109	35 unit	712,920	35 unit	784,212	35 unit	862,633	35 unit	4,132,691	Setwan	Kajen	
				g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	48.69	9 unit	10,625	9 unit	11,688	9 unit	12,857	9 unit	14,143	9 unit	15,557	9 unit	17,113	9 unit	81,983	Setwan	Kajen	
				h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah telephone, faximille, TV kabel, Service TV yang terpelihara secara rutin/berkala	50	4 unit	5,000	4 unit	5,500	4 unit	6,050	4 unit	6,655	4 unit	7,321	4 unit	8,053	4 unit	38,579	Setwan	Kajen	
				i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeulair yang terpelihara secara rutin/berkala	0	1 paket	20,000	1 paket	22,000	1 paket	24,200	1 paket	26,620	1 paket	29,282	1 paket	32,210	1 paket	154,312	Setwan	Kajen	
				j. Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD	99.17	12 bulan	-	0	0	12 bulan	64,678	12 bulan	71,146	12 bulan	78,261	12 bulan	86,087	12 bulan	300,172	Setwan	Kajen	
				k. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah yang direhabilitasi sedang/berat	0	1 rumah	250,000	1 rumah	275,000	1 rumah	302,500	1 rumah	332,750	1 rumah	366,025	1 rumah	402,628	1 rumah	1,928,903	Setwan	Kajen	
				l. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat	0	1 gedung	-	1 gedung	115,000	1 gedung	126,500	1 gedung	139,150	1 gedung	153,065	1 gedung	168,372	1 gedung	702,087	Setwan	Kajen	
				m. Pengadaan jaringan Internet dan perlengkapannya	Jumlah jaringan Internet dan perlengkapannya yang tersedia	0	1 unit	10,000	1 unit	11,000	1 unit	12,100	1 unit	13,310	1 unit	14,641	1 unit	16,105	1 unit	77,156	Setwan	Kajen	
				n. Pembangunan tempat parkir	Jumlah tempat yang dibangun untuk parkir	0	1 tempat	100,750	1 tempat	110,825	1 tempat	121,908	1 tempat	134,099	1 tempat	147,509	1 tempat	162,260	1 tempat	777,351	Setwan	Kajen	
				o. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	95.38	10 unit	588,782	10 unit	647,660	10 unit	712,426	10 unit	783,669	10 unit	862,036	10 unit	948,240	10 unit	4,542,813	Setwan	Kajen	
				p. Penambahan daya listrik gedung kantor	Jumlah penambahan daya listrik gedung kantor	0	0	-	1 unit	185,000	1 unit	203,500	1 unit	223,850	1 unit	246,235	1 unit	270,859	1 unit	1,129,444	Setwan	Kajen	
				q. Pembangunan mushola dan gazebo rumah dinas	Jumlah mushola dan gazebo rumah dinas yang tersedia	0	1 Mushola dan 1 gazebo	197,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Mushola dan 1 gazebo	197,700	Setwan	Kajen
				r. Pengadaan background digital	Jumlah background digital yang tersedia	0	0	-	1 unit	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	205,000	Setwan	Kajen

92,414,116

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2015	target	Rp	target			Rp	target								
					s. Pengadaan papan informasi elektronik	0	0	-	1 unit	90,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit	90,000	Setwan	Kajen
					t. Renovasi Jaringan instalasi listrik gedung kantor	0	1 unit	86,036	1 unit	94,640	1 unit	104,104	1 unit	114,514	1 unit	125,965	1 unit	138,562	100	663,821	Setwan	Kajen
					u. Pengadaan penghias rumah tangga	0	0	-	5 unit	100,000	5 unit	110,000	5 unit	121,000	5 unit	133,100	5 unit	146,410	100	610,510	Setwan	Kajen
					v. Pembuatan DED Renovasi gedung DPRD	0	0	-	0	0	1 dokumen	250,000	0	-	0	-	0	-	1 dokumen	250,000	Setwan	Kajen
					w. Aplikasi software jaringan data dan informasi hukum	0	0	-	0	0	1 aplikasi	70,000	0	-	0	-	0	-	1 aplikasi	70,000	Setwan	Kajen
					3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	20	143,462	40	157,808	60	173,589	80	190,948	100	210,043	100	231,047	100	1,106,897	Setwan	Kajen
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya aparatur dengan kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang memadai	Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, BinteK koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja DPRD			Pendidikan dan pelatihan formal	50	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	143,462	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	157,808	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	173,589	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	190,948	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	210,043	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	231,047	Asdeksi Nasional 2 kali, Asdeksi wilayah 3 kali, Diklat/Pelatihan 2 kali	1,106,897	Setwan	Kajen
					4. Program peningkatan disiplin aparatur	100	100	176,020	100	193,622	100	212,984	100	234,282	100	257,710	100	283,481	100	1,358,099	Setwan	Kajen
Meningkatkan disiplin aparatur	Tersedianya aparatur dengan kualitas kedisiplinan yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD	Terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas disiplin aparatur			Pengadaan pakaian dinas	73.3	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	176,020	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	193,622	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	212,984	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	234,282	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	257,710	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	283,481	PSH 90 stel, PSR 45 stel, PSL 2 stel	1,358,099	Setwan	Kajen
					5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100	20	53,453	20	58,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setwan	Kajen

92,414,116

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2015	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target
Meningkatkan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi DPRD	Tercukupinya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang yang berkualitas bagi optimalisasi pelaksanaan tugas dan	Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana bagi DPRD dalam jumlah dan kondisi yang memadai		a. Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD	0	12 bulan	53,453	12 bulan	58,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setwan	Kajen	
Mengoptimalkan penyebaran informasi kegiatan-kegiatan dan profil DPRD kepada masyarakat	Terpublikasikannya kegiatan-kegiatan dan profil DPRD	Tercapainya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		b. Iklan Layanan Masyarakat	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyebaran informasi kinerja DPRD melalui media cetak dan	0	0	-	12 bulan	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setwan	Kajen	

92,414,116

342536 414468 455915 501507

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
							2015	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
PEMERINTAHAN UMUM																	
				1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase pencapaian peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	100	20	14,798,941	40	220,247,500	60	242,272,250	80	266,499,475	100	293,149,423	
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tertampungnya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah penyelenggaraan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	24	24	89,855	24	220,247,500	24	242,272,250	24	266,499,475	24	293,149,423	
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terselenggaranya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan		b. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	60	12	180,000	24	198,000,000	36	217,800,000	48	239,580,000	60	263,538,000	
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terselenggaranya Rapat-rapat paripurna		c. Rapat-rapat paripurna	Jumlah penyelenggaraan Rapat-rapat paripurna	28	28	199,020	28	218,922,000	28	240,814,200	28	264,895,620	28	291,385,182	
Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tertampungnya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya kegiatan Reses bagi DPRD		d. Kegiatan Reses	Jumlah pelaksanaan kegiatan Reses	3	3	2,655,449,600	3	2,360,122,600	3	2,596,134,860	3	2,855,748,346	3	3,141,323,181	

						b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	12	247,962	24	272,757,870	36	300,033,657	48	330,037,023	60	363,040,726
						c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	12	37,800	24	41,580,000	36	45,738,000	48	50,311,800	60	55,342,980
						d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	60	12	64,260	24	70,686,000	36	77,754,600	48	85,530,060	60	94,083,066
						e. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan dalam rangka terlaksananya tertib administrasi	4	4	41,800	4	45,980,000	4	50,578,000	4	55,635,800	4	61,199,380
						f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	60	12	40,535	24	44,588,500	36	49,047,350	48	53,952,085	60	59,347,294
						g. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan alat tulis kantor	60	12	147,496	24	165,000,000	36	181,500,000	48	199,650,000	60	219,615,000
						h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	12	81,993	24	93,500,000	36	102,850,000	48	113,135,000	60	124,448,500
						i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	12	15,000	24	165,000,000	36	181,500,000	48	199,650,000	60	219,615,000

						j. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan peralatan rumah tangga	60	12	90,000	24	99,000,000	36	108,900,000	48	119,790,000	60	131,769,000
						k. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan makanan dan minuman	60	12	202,561	24	167,817,100	36	184,598,810	48	203,058,691	60	223,364,561
						l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar	100	20	1,600,000	40	1,540,000,000	60	1,694,000,000	80	1,863,400,000	100	2,049,740,000
						m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	100	20	100,000	40	110,000,000	60	121,000,000	80	133,100,000	100	146,410,000
						n. Penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	Jumlah tenaga kebersihan dan tenaga lainnya dalam rangka menjaga kebersihan kantor dan lainnya	8	8	177,608	8	197,161,030	8	216,877,133	8	238,564,847	8	262,421,332
						2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	100	20	3,113,961	40	-	60	-	80	-	100	-
Meningkatkan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi DPRD	Tercukupinya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang yang berkualitas bagi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana bagi DPRD dalam jumlah dan kondisi yang memadai				a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis Pengadaan kendaraan dinas/operasional	4 kendaraan roda 4	4 Kendaraan roda 4	874,435	4 Kendaraan roda 4	274,182,700	-	301,600,970	-	331,761,067	-	364,937,173
						b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1	1	110,000	1	121,000,000	1	133,100,000	1	146,410,000	1	161,051,000

						c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas											
						d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara dalam satu tahun	1	1	89,250	1	98,175,000	1	107,992,500	1	118,791,750	1	130,670,925
						e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara dalam satu tahun	4	4	235,755	4	259,330,500	4	285,263,550	4	313,789,905	4	345,168,896
						f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara dalam satu tahun	38	38	535,627	38	589,189,700	38	648,108,670	38	712,919,537	38	784,211,491
						g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	60	12	10,625	24	11,687,500	36	12,856,250	48	14,141,875	60	15,556,063
						h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	60	12	5,000	24	5,500,000	36	6,050,000	48	6,655,000	60	7,320,500
						i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	60	12	20,000	24	22,000,000	36	24,200,000	48	26,620,000	60	29,282,000
						j. Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD	60	12	53,453	24	60,500,000	36	66,550,000	48	73,205,000	60	80,525,500
						k. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah gedung yang di lakukan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1	1	250,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	1	366,025,000
						l. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung yang dilakukan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1	1		1	242,000,000	1	266,200,000	1	292,820,000	1	322,102,000

						m. Pengadaan jaringan Internet dan perlengkapannya	Jumlah paket Pengadaan jaringan Internet dan perlengkapannya	1	1	10,000	-	-	-	-	-	-	-	
						n. Pembangunan tempat parkir	Jumlah paket untuk Pembangunan tempat parkir	1	1	100,750	-	-	-	-	-	-	-	-
						o. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	588,782	1	1,719,555,200	1	1,891,510,720	1	2,099,576,900	1	2,309,534,590
						p. Penambahan daya listrik gedung kantor	Jumlah penambahan daya listrik gedung kantor	1	1	86,037	-	-	-	-	-	-	-	-
						q. Pembangunan mushola dan gazebo rumah dinas	Jumlah paket Pembangunan mushola dan gazebo rumah dinas	1	1	197,700	-	-	-	-	-	-	-	-
						r. Pengadaan background digital	Jumlah paket dalam pengadaan background digital											
						s. Pengadaan papan informasi elektronik	Jumlah paket dalam rangka pengadaan papan informasi elektronik											
						t. Pengadaan penghias rumah tangga	Jumlah paket dalam rangka pengadaan penghias rumah tangga											
						3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, Bintel koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	100	20	143,462	40	157,808,200	60	173,589,020	80	190,947,922	100	210,042,715
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya aparatur dengan kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang memadai	Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, Bintel koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	60	12	143,462	24	157,808,200	36	173,589,020	48	190,947,922	60	210,042,715

						4. Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan disiplin aparatur	100	20	176,020	40	188,892,000	60	207,781,200	80	228,559,320	100	386,865,252
Meningkatkan disiplin aparatur	Tersedianya aparatur dengan kualitas kedisiplinan yang memadahi untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD	Terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas disiplin aparatur				Pengadaan pakaian dinas	Jumlah dan jenis pengadaan pakaian dinas dalam satu tahun	2 PSL,45 PSR, 90 PSH	2 PSL,45 PSR, 90 PSH	176,020	45 PSR, 90 PSH	188,892,000	45 PSR, 90 PSH	207,781,200	45 PSR, 90 PSH	228,559,320	45 PSR, 90 PSH,45 PSL	386,865,252

Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
target	Rp	target	Rp		
20	322,464,366	100	322,464,366	Setwan	Kajen
24	322,464,366	24	322,464,366	Setwan	Kajen
12	289,891,800	60	289,891,800	Setwan	Kajen
12	320,523,701	12	320,523,701	Setwan	Kajen
3	3,455,455,500	3	3,455,455,500	Setwan	Kajen

20	920,567,516	100	920,567,516	Setwan	Kajen
20	7,547,223,500	100	7,547,223,500	Setwan	Kajen
120	29,874,961	120	29,874,961	Setwan	Kajen
4	281,839,250	4	281,839,250	Setwan	Kajen

6	478,297,512	6	478,297,512	Setwan	Kajen
180	579,783,600	180	579,783,600	Setwan	Kajen
45	3,082,261,681	45	3,082,261,681	Setwan	Kajen
-	-	2	57,000,000	Setwan	Kajen
20	4,264,477,483	100	4,264,477,483	Setwan	Kajen
12	43,750,000	60	43,750,000	Setwan	Kajen

2795,245
0 SK

12	399,344,799	60	399,344,799	Setwan	Kajen
12	60,877,278	60	60,877,278	Setwan	Kajen
12	103,491,373	60	103,491,373	Setwan	Kajen
4	67,319,318	4	67,319,318	Setwan	Kajen
12	65,282,024	60	65,282,024	Setwan	Kajen
12	241,576,500	60	241,576,500	Setwan	Kajen
12	136,893,350	60	136,893,350	Setwan	Kajen
12	241,576,500	60	241,576,500	Setwan	Kajen

12	144,945,900	60	144,945,900	Setwan	Kajen
12	245,701,018	60	245,701,018	Setwan	Kajen
20	2,254,714,000	100	2,254,714,000	Setwan	Kajen
20	161,051,000	100	161,051,000	Setwan	Kajen
8	288,663,466	8	288,663,466	Setwan	Kajen
20	-	100	-	Setwan	Kajen
-	-	4 Kendaraan roda 4	1,272,481,910	Setwan	Kajen
1	177,156,100	1	177,156,100	Setwan	Kajen

1 paket

23 kali

60 kali

1	143,738,018	1	143,738,018	Setwan	Kajen
4	379,685,786	4	379,685,786	Setwan	Kajen
38	862,632,641	38	862,632,641	Setwan	Kajen
12	17,111,670	60	17,111,670	Setwan	Kajen
12	8,052,550	60	8,052,550	Setwan	Kajen
12	32,210,200	60	32,210,200	Setwan	Kajen
12	88,578,050	60	88,578,050	Setwan	Kajen
1	402,627,500	1	402,627,500	Setwan	Kajen
1	354,312,200	1	354,312,200	Setwan	Kajen

-	-	1	10,000,000	Setwan	Kajen
-	-	1	100,750,000	Setwan	Kajen
1	2,540,488,049	1	2,540,488,049	Setwan	Kajen
-	-	1	87,145,000	Setwan	Kajen
-	-	1	200,000,000	Setwan	Kajen
20	231,046,987	100	231,046,987	Setwan	Kajen
12	231,046,987	60	231,046,987	Setwan	Kajen

20	276,556,778	100	421,681,778	Setwan	Kajen
45 PSR, 90 PSH	276,556,778	45 PSR, 90 PSH,45 PSL	421,681,778	Setwan	Kajen

Tabel V.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
			2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas administrasi perkantoran	Persen	100	2,647,905,000	40	2,912,695,500	60	3,203,965,050	80	3,524,361,555	100	3,876,797,711	20	4,264,477,483	100	4,264,477,483	Setwan	Kajen
a. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa surat menyurat	bulan	60	12	24	43,750,000	36	43,750,000	48	43,750,000	60	43,750,000	12	43,750,000	60	43,750,000	Setwan	Kajen
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	12	24	272,757,870	36	300,033,657	48	330,037,023	60	363,040,726	12	399,344,799	60	399,344,799	Setwan	Kajen
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	bulan	60	12	24	41,580,000	36	45,738,000	48	50,311,800	60	55,342,980	12	60,877,278	60	60,877,278	Setwan	Kajen
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	bulan	60	12	24	70,686,000	36	77,754,600	48	85,530,060	60	94,083,066	12	103,491,373	60	103,491,373	Setwan	Kajen
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan dalam rangka terlaksananya tertib administrasi	orang	4	4	4	45,980,000	4	50,578,000	4	55,635,800	4	61,199,380	4	67,319,318	4	67,319,318	Setwan	Kajen

2795,245
0 SK

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	60	12	24	44,588,500	36	49,047,350	48	53,952,085	60	59,347,294	12	65,282,024	60	65,282,024	Setwan	Kajen
g. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan alat tulis kantor	bulan	60	12	24	165,000,000	36	181,500,000	48	199,650,000	60	219,615,000	12	241,576,500	60	241,576,500	Setwan	Kajen
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	12	24	93,500,000	36	102,850,000	48	113,135,000	60	124,448,500	12	136,893,350	60	136,893,350	Setwan	Kajen
i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	12	24	165,000,000	36	181,500,000	48	199,650,000	60	219,615,000	12	241,576,500	60	241,576,500	Setwan	Kajen
j. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	60	12	24	99,000,000	36	108,900,000	48	119,790,000	60	131,769,000	12	144,945,900	60	144,945,900	Setwan	Kajen
k. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	12	24	167,817,100	36	184,598,810	48	203,058,691	60	223,364,561	12	245,701,018	60	245,701,018	Setwan	Kajen
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persen	100	20	40	1,540,000,000	60	1,694,000,000	80	1,863,400,000	100	2,049,740,000	20	2,254,714,000	100	2,254,714,000	Setwan	Kajen
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	persen	100	20	40	110,000,000	60	121,000,000	80	133,100,000	100	146,410,000	20	161,051,000	100	161,051,000	Setwan	Kajen

n. Penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	Jumlah tenaga kebersihan dan tenaga lainnya dalam rangka menjaga kebersihan kantor dan lainnya	orang	8	8	8	197,161,030	8	216,877,133	8	238,564,847	8	262,421,332	8	288,663,466	8	288,663,466	Setwan	Kajen
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan	Persen	100	20	40	-	60	-	80	-	100	-	20	-	100	-	Setwan	Kajen
a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis Pengadaan kendaraan dinas/operasional	unit	4 kendaraan roda 4	4 Kendaraan roda 4	4 Kendaraan roda 4	274,182,700	-	301,600,970	-	331,761,067	-	364,937,173	-	-	4 Kendaraan roda 4	1,272,481,910	Setwan	Kajen
b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Paket	1	1	1	121,000,000	1	133,100,000	1	146,410,000	1	161,051,000	1	177,156,100	1	177,156,100	Setwan	Kajen
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara dalam satu tahun	gedung	1	1	1	98,175,000	1	107,992,500	1	118,791,750	1	130,670,925	1	143,738,018	1	143,738,018	Setwan	Kajen
d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara dalam satu tahun	Unit	4	4	4	259,330,500	4	285,263,550	4	313,789,905	4	345,168,896	4	379,685,786	4	379,685,786	Setwan	Kajen
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara dalam satu tahun	unit	38	38	38	589,189,700	38	648,108,670	38	712,919,537	38	784,211,491	38	862,632,641	38	862,632,641	Setwan	Kajen
f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	bulan	60	12	24	11,687,500	36	12,856,250	48	14,141,875	60	15,556,063	12	17,111,670	60	17,111,670	Setwan	Kajen
g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	bulan	60	12	24	5,500,000	36	6,050,000	48	6,655,000	60	7,320,500	12	8,052,550	60	8,052,550	Setwan	Kajen

h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	bulan	60	12	24	22,000,000	36	24,200,000	48	26,620,000	60	29,282,000	12	32,210,200	60	32,210,200	Setwan	Kajen
i. Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pemeliharaan rutin/berkala website DPRD	bulan	60	12	24	60,500,000	36	66,550,000	48	73,205,000	60	80,525,500	12	88,578,050	60	88,578,050	Setwan	Kajen
j. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah gedung yang di lakukan Rehabilitasi sedang/berat	gedung	1	1	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	1	366,025,000	1	402,627,500	1	402,627,500	Setwan	Kajen
k. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung yang dilakukan Rehabilitasi sedang/berat	gedung	1	1	1	242,000,000	1	266,200,000	1	292,820,000	1	322,102,000	1	354,312,200	1	354,312,200	Setwan	Kajen
l. Pengadaan jaringan Internet dan perlengkapannya	Jumlah paket Pengadaan jaringan Internet dan perlengkapannya	paket	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	Setwan	Kajen
m. Pembangunan tempat parkir	Jumlah paket untuk Pembangunan tempat parkir	paket	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,750,000	Setwan	Kajen
n. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	1	1	1,719,555,200	1	1,891,510,720	1	2,099,576,900	1	2,309,534,590	1	2,540,488,049	1	2,540,488,049	Setwan	Kajen
o. Renovasi jaringan instalasi listrik	Jumlah paket untuk Renovasi jaringan instalasi listrik	paket	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87,145,000	Setwan	Kajen
p. Pembangunan mushola dan gazebo rumah dinas	Jumlah paket Pembangunan mushola dan gazebo rumah dinas	paket	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	Setwan	Kajen
3. Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan disiplin aparatur	persen	100	20	40	188,892,000	60	207,781,200	80	228,559,320	100	386,865,252	20	276,556,778	100	421,681,778	Setwan	Kajen
Pengadaan pakaian dinas	Jumlah dan jenis pengadaan pakaian dinas dalam satu tahun	stel	2 PSL,45 PSR, 90 PSH	2 PSL,45 PSR, 90 PSH	45 PSR, 90 PSH	188,892,000	45 PSR, 90 PSH	207,781,200	45 PSR, 90 PSH	228,559,320	45 PSR, 90 PSH,45 PSL	386,865,252	45 PSR, 90 PSH	276,556,778	45 PSR, 90 PSH,45 PSL	421,681,778	Setwan	Kajen

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase bulan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	20	40	157,808,200	60	173,589,020	80	190,947,922	100	210,042,715	20	231,046,987	100	231,046,987	Setwan	Kajen
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	bulan	60	12	24	157,808,200	36	173,589,020	48	190,947,922	60	210,042,715	12	231,046,987	60	231,046,987	Setwan	Kajen
5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase bulan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	persen	100	20	40	220,247,500	60	242,272,250	80	266,499,475	100	293,149,423	20	322,464,366	100	322,464,366	Setwan	Kajen
a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah penyelenggaraan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	kali	24	24	24	220,247,500	24	242,272,250	24	266,499,475	24	293,149,423	24	322,464,366	24	322,464,366	Setwan	Kajen
b. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	bulan	60	12	24	198,000,000	36	217,800,000	48	239,580,000	60	263,538,000	12	289,891,800	60	289,891,800	Setwan	Kajen
c. Rapat-rapat paripurna	Jumlah penyelenggaraan Rapat-rapat paripurna	kali	28	28	28	218,922,000	28	240,814,200	28	264,895,620	28	291,385,182	12	320,523,701	12	320,523,701	Setwan	Kajen
d. Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan yang terpenuhi dalam rangka Reses	kali	3	3	3	2,360,122,600	3	2,596,134,860	3	2,855,748,346	3	3,141,323,181	3	3,455,455,500	3	3,455,455,500	Setwan	Kajen
e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	persen	100	20	40	628,760,000	60	691,636,000	80	760,799,600	100	836,879,560	20	920,567,516	100	920,567,516	Setwan	Kajen
f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Prosentase bulan yang terpenuhi Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	persen	100	20	40	5,154,855,200	60	5,670,340,720	80	6,237,374,792	100	6,861,112,272	20	7,547,223,500	100	7,547,223,500	Setwan	Kajen

g. Penerbitan himpunan SK dan Risalah DPRD	Jumlah buku Penerbitan himpunan SK dan Risalah DPRD	buku	120	120	120	20,405,000	120	22,445,500	120	24,690,050	120	27,159,055	120	29,874,961	120	29,874,961	Setwan	Kajen
h. Penyusunan naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif DPRD	naskah	2	4	4	192,500,000	4	211,750,000	4	232,925,000	4	256,217,500	4	281,839,250	4	281,839,250	Setwan	Kajen
i. Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD	orang	6	6	6	188,232,000	6	207,055,200	6	395,287,200	6	434,815,920	6	478,297,512	6	478,297,512	Setwan	Kajen
k. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Jumlah orang yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	orang	180	180	180	396,000,000	180	435,600,000	180	479,160,000	180	527,076,000	180	579,783,600	180	579,783,600	Setwan	Kajen
l. Pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	orang	45	45	45	2,105,226,200	45	2,315,748,820	45	2,547,323,702	45	2,802,056,073	45	3,082,261,681	45	3,082,261,681	Setwan	Kajen
m. Pelantikan penggantian antar waktu pimpinan DPRD	Jumlah orang yang mengikuti pelantikan penggantian antar waktu pimpinan DPRD	orang		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	57,000,000	Setwan	Kajen

Tabel V.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekre
Kabupaten Pekalongan

paket

kali

kali

tariat DPRD

TABEL 6.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program						
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Pemerintahan Umum								
1	Prosentase peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (%)	85	100	100	100	100	100	100	100
	Non Urusan								
1	Prosentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi perkantoran selama lima tahun (%)	0	20	40	60	80	100	100	100
2	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	0	20	40	60	80	100	100	480
3	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, Bintek koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	0	20	40	60	80	100	100	480
4	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan disiplin aparatur selama lima tahun (%)	0	100	100	100	100	100	100	600

TABEL VI.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	a. Penyediaan jasa surat menyurat	lembar		2.795 SM, 2.450 SK	2.795 SM, 2.450 SK	2.795 SM, 2.450 SK	2.795 SM, 2.450 SK	2.795 SM, 2.450 SK	2.795 SM, 2.450 SK	2.795 SM, 2.450 SK
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	e. Penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	g. Penyediaan alat tulis kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	h. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	j. Penyediaan peralatan rumah tangga	paket		1	1	1	1	1	12	12
	k. Penyediaan makanan dan minuman	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali		23	23	23	23	23	23	23
	m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	kali		60	60	60	60	60	60	60
	n. Penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	bulan		12	12	12	12	12	12	12
2	a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	unit		4	1	1	1	1	-	4
	b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	i. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	j. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
	k. Pengadaan jaringan Internet dan perengkapannya	paket		1	-	-	-	-	-	1
	l. Pembangunan tempat parkir	paket		1	-	-	-	-	-	1
	m. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12

